

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**KEBIJAKAN PRESIDEN SOEKARNO TERHADAP
PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA TAHUN 1963**

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Disusun oleh:

FX. BUDI KUSTANTO

071314016

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2014

**KEBIJAKAN PRESIDEN SOEKARNO TERHADAP
PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA TAHUN 1963**

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Disusun oleh:

FX. BUDI KUSTANTO

071314016

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2014

MAKALAH

**KEBIJAKAN PRESIDEN SOEKARNO TERHADAP
PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA TAHUN 1963**



Oleh:
FX. BUDI KUSTANTO
NIM: 071314016

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A.K. Wiharyanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. A.K Wiharyanto., M.M.

Tanggal, 20 Agustus 2014

MAKALAH
KEBIJAKAN PRESIDEN SOEKARNO TERHADAP PEMBENTUKAN
FEDERASI MALAYSIA TAHUN 1963

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
FX. BUDI KUSTANTO
NIM: 071314016

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 30 Agustus 2014
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

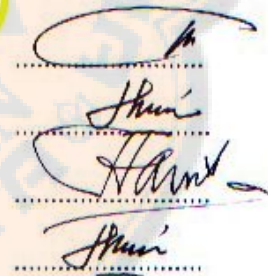
Tanda Tangan

Ketua : Indra Darmawan, S.E., M.Si

Sekretaris : Dra. Th. Sumini, M.Pd.

Anggota : Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M

Anggota : Dra. Th. Sumini, M.Pd.



Yogyakarta, 30 Agustus 2014
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Dekan

Rohandi, Ph. D

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

Kita mengajarkan disiplin untuk giat, untuk bekerja, untuk kebaikan, bukan agar anak-anak menjadi loyo, pasif, atau penurut.

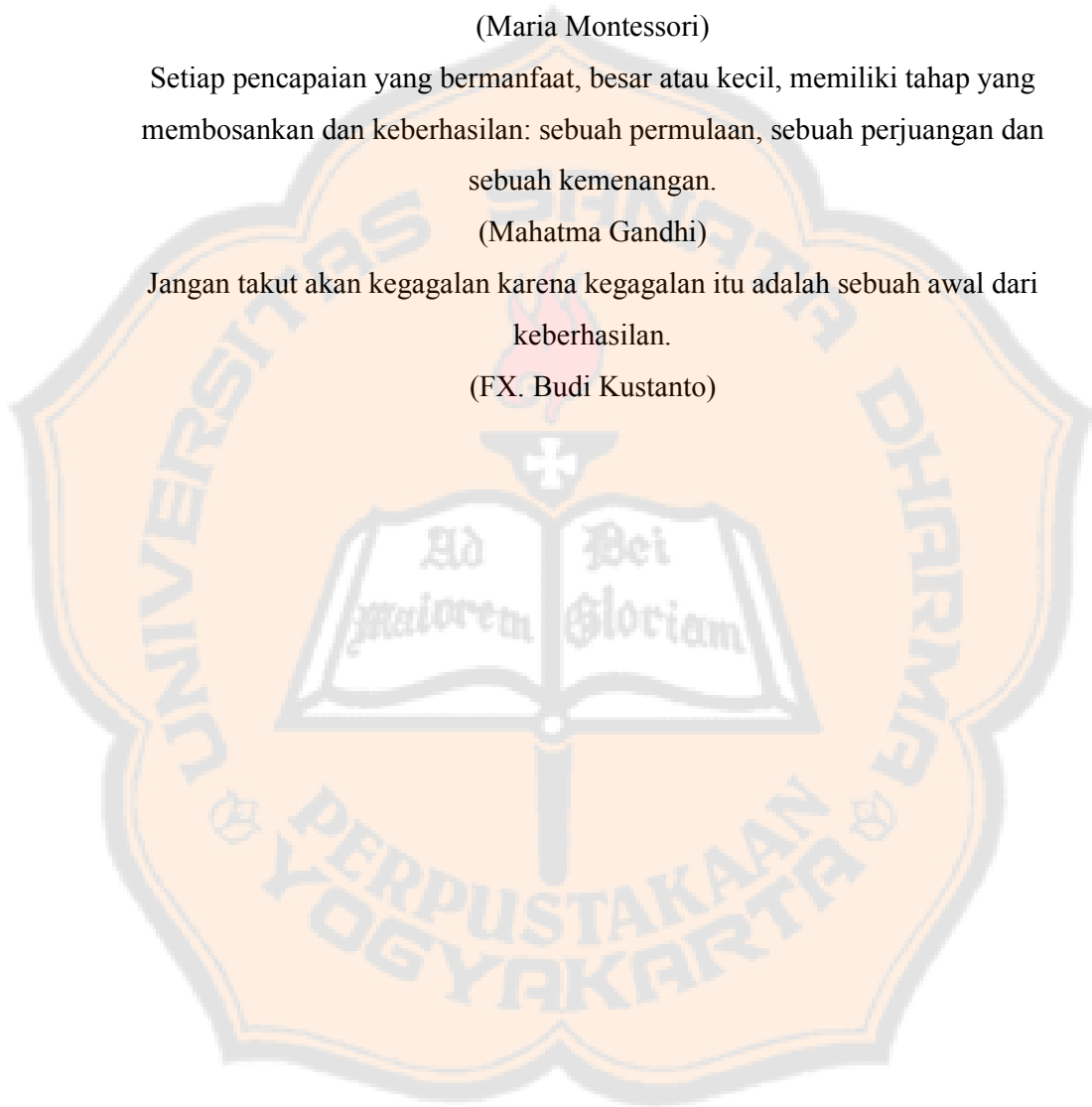
(Maria Montessori)

Setiap pencapaian yang bermanfaat, besar atau kecil, memiliki tahap yang membosankan dan keberhasilan: sebuah permulaan, sebuah perjuangan dan sebuah kemenangan.

(Mahatma Gandhi)

Jangan takut akan kegagalan karena kegagalan itu adalah sebuah awal dari keberhasilan.

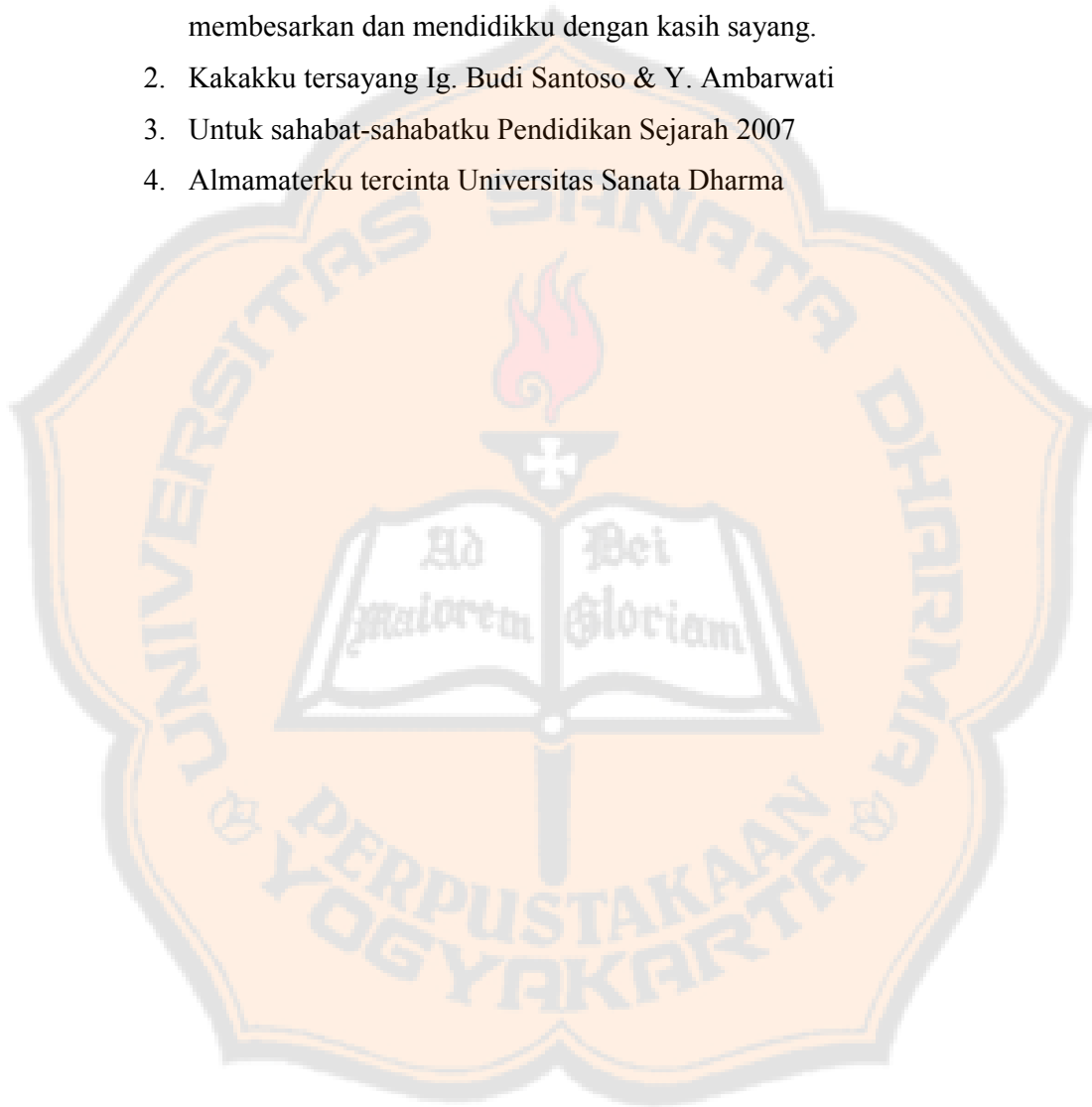
(FX. Budi Kustanto)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Makalah ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Suhartono. P dan Ibu Y. Supriyati yang telah membesarkan dan mendidikku dengan kasih sayang.
2. Kakakku tersayang Ig. Budi Santoso & Y. Ambarwati
3. Untuk sahabat-sahabatku Pendidikan Sejarah 2007
4. Almamaterku tercinta Universitas Sanata Dharma

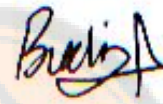


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 30 Agustus 2014

Penulis



Fx. Budi Kustanto



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa universitas sanata dharma:

Nama : Fx. Budi Kustanto

Nomor Mahasiswa : 071314013

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEBIJAKAN PRESIDEN SOEKARNO TERHADAP PEMBENTUKAN
FEDERASI MALAYSIA TAHUN 1963**

Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2014

Yang menyatakan


Fx. Budi Kustanto

ABSTRAK

**KEBIJAKAN PRESIDEN SOEKARNO TERHADAP PEMBENTUKAN
FEDERASI MALAYSIA TAHUN 1963**

FX. Budi Kustanto
Universitas Sanata Dharma
2014

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dua permasalahan pokok, yaitu: 1). Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963. 2). Penyelesaian konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia.

Penulisan ini menggunakan metode sejarah yang mencakup lima tahapan, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, dan interpretasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidimensional dan ditulis secara deskriptif analitis.

Hasil penulisan ini adalah 1). Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963 adalah dengan mengeluarkan kebijakan konfrontasi militer. 2). Penyelesaian konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia diakhiri dengan perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta.

ABSTRACT

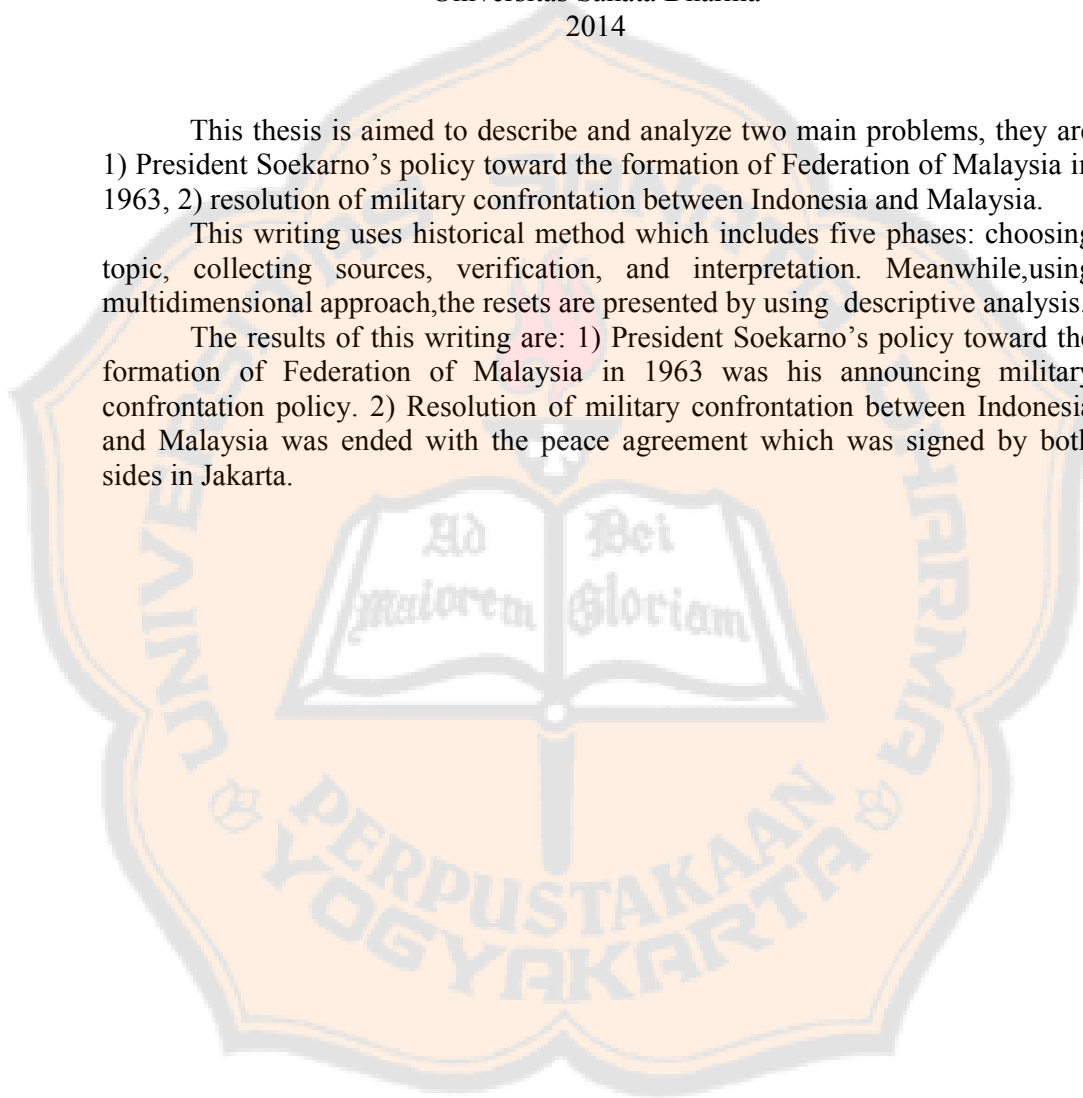
**PRESIDENT SOEKARNO'S POLICY TOWARD THE
FORMATION OF FEDERATION OF MALAYSIA IN 1963**

FX. Budi Kustanto
Universitas Sanata Dharma
2014

This thesis is aimed to describe and analyze two main problems, they are 1) President Soekarno's policy toward the formation of Federation of Malaysia in 1963, 2) resolution of military confrontation between Indonesia and Malaysia.

This writing uses historical method which includes five phases: choosing topic, collecting sources, verification, and interpretation. Meanwhile, using multidimensional approach, the results are presented by using descriptive analysis.

The results of this writing are: 1) President Soekarno's policy toward the formation of Federation of Malaysia in 1963 was his announcing military confrontation policy. 2) Resolution of military confrontation between Indonesia and Malaysia was ended with the peace agreement which was signed by both sides in Jakarta.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan walaupun banyak kendala yang menghambat proses penyusunan makalah ini, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak makalah ini dapat terselesaikan. Makalah ini berjudul “KEBIJAKAN PRESIDEN SOEKARNO TERHADAP PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA TAHUN 1963”. Makalah ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar sarjana Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulisan makalah ini terwujud berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah berkenan membimbing, membantu, dan memotivasi penulis. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ketua jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Th. Sumini., M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Drs. A.K. Wiharyanto, M.M., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan banyak arahan serta masukan selama penulisan makalah ini.
4. Kedua orang tuaku Bapak Suhartono. P dan Ibu Yulita Supriyati terima kasih atas doa serta dukungan yang diberikan selama ini.
5. Seluruh teman-teman terutama teman dari pendidikan Sejarah 2007, terima kasih doa dan dukungannya.
6. Seluruh karyawan perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah dengan sabar memberikan pelayanan peminjaman buku demi kelancaran penyusunan makalah ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan secara satu – persatu oleh penulis dalam makalah ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Penulis,



FX. Budi Kustanto

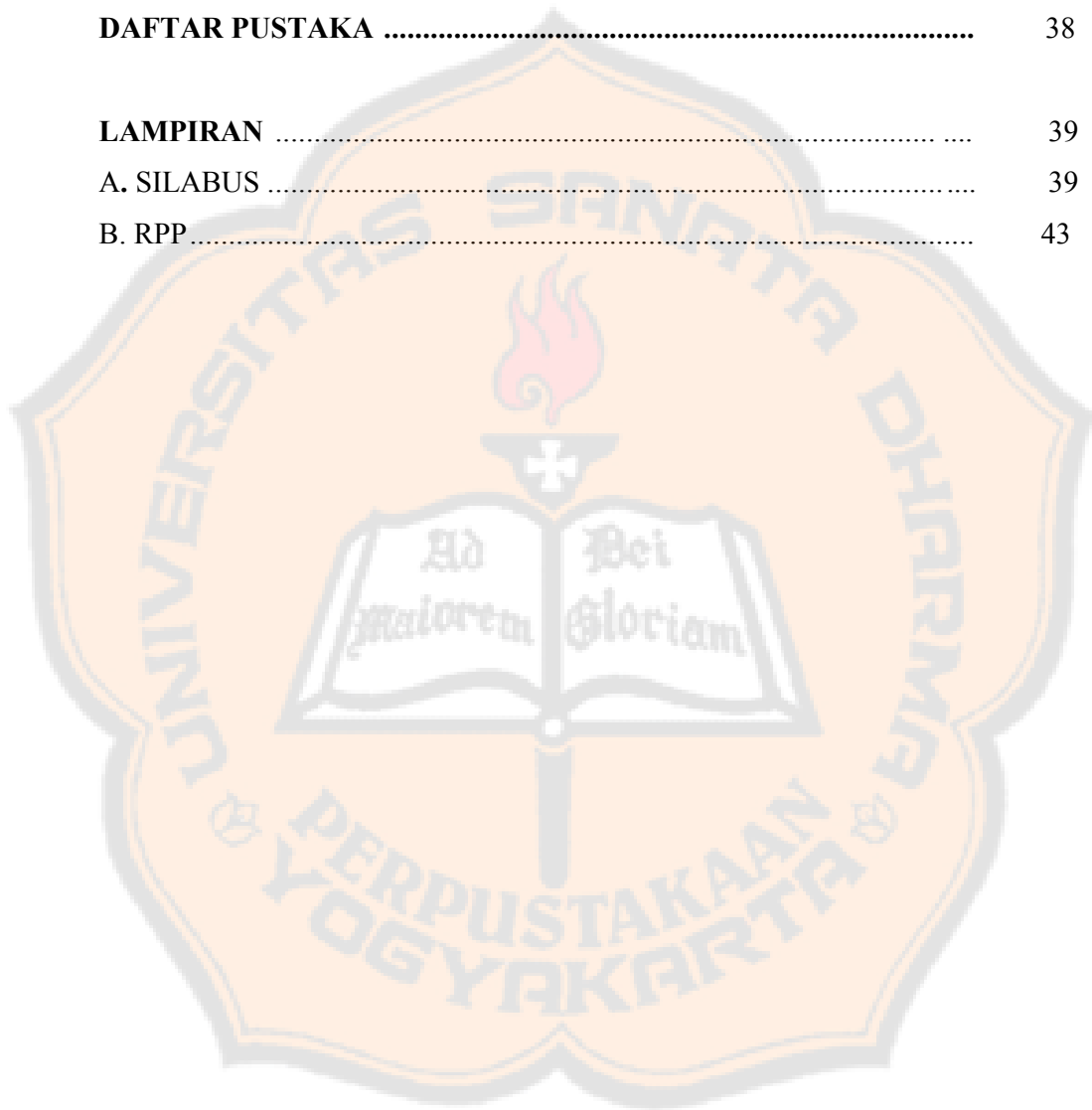


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II: KEBIJAKAN PRESIDEN SOEKARNO TERHADAP PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA TAHUN 1963 .	5
A. Reaksi pemerintah Indonesia terhadap negara federasi Malaysia.	5
B. Konfrontasi terhadap Malaysia	13
BAB III: PENYELESAIAN KONFRONTASI MILITER ANTARA INDONESIA-MALAYSIA	24
A. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian konfrontasi.....	25
B. Penyelesaian konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia	28

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia.....	32
BAB IV : KESIMPULAN	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	39
A. SILABUS	39
B. RPP.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno bersifat *high profile* yang diwarnai dengan sikap anti imperialisme, kolonialisme dan konfrontasi. Sejak awal pemerintah Indonesia tidak mendukung tentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu (PTM). Presiden Soekarno mencurigai kemerdekaan Malaya merupakan rekayasa pemerintah kolonial Inggris. Tuduhan ini berdasarkan pemberian kemerdekaan oleh Inggris kepada Federasi Malaysia. Dalam federasi tersebut Undang-Undang Dasar Federasi Malaysia juga dibentuk oleh Inggris.¹

Inggris juga mewajibkan kepada Federasi Malaysia untuk mengadakan perjanjian ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Dengan perjanjian tersebut Inggris berhak menempatkan armada perangnya di Malaysia. Keberadaan tentara Inggris di Malaya merupakan ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berani Presiden Soekarno melakukan petualangan konfrontasi untuk menggagalkan rencana Inggris yang akan membentuk Federasi Malaysia. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilannya dalam merebut kembali Irian Barat.²

Konflik antara Indonesia dengan Malaysia pecah pada saat Tengku Abdurrahman mengumumkan pembentukan Federasi Malaysia. Federasi ini meliputi: Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara. Pembentukan Federasi

¹ Efantino Febriana dan Arifin, 2009, *Ganyang Malaysia*, Yogyakarta, Bio Pustaka, hlm. 7.

² Elson, 2009, *The Idea of Indonesia*, Jakarta, Serambi Ilmu, hlm. 349.

Malaysia ini ternyata mendapatkan tentangan dari sebagian rakyat yang tinggal di Kalimantan Utara. Presiden Soekarno sangat bersimpati terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam menentang pembentukan federasi Malaysia. Kalimantan Utara harus menjadi negara yang merdeka bukan dalam Federasi Malaysia. Presiden Soekarno mencurigai bahwa pembentukan Malaysia adalah tindakan kekuatan neo-kolonialisme. Hal ini dianggap sebagai usaha untuk melakukan pengepungan terhadap Indonesia. Presiden Soekarno berpandangan bahwa posisi Indonesia akan menjadi terjepit di antara negara-negara yang selama ini dianggap sebagai musuh. Di sebelah utara ada negara Malaysia sedangkan di sebelah selatan ada negara Australia dan Selandia Baru. Untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan politik konfrontasi dengan Malaysia. Dukungan politik Presiden Soekarno diungkapkan dengan pernyataan “bahwa perjuangan rakyat di Kalimantan Utara adalah bagian dari perjuangan negara-negara yang membenci penghisapan manusia oleh manusia”. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan tentara Indonesia dan juga sukarelawan untuk menyerang Malaysia. Konfrontasi semakin hebat ketika Presiden Soekarno mendapatkan dukungan dari negara China³

Keterlibatan negara-negara lain telah mengakibatkan intensitas konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia semakin meningkat. Negara Indonesia mendapatkan dukungan dari Negara Republik Rakyat China, sedangkan Malaysia

³ A. Kardiyat Wiharyanto, 1989, *Reaksi Terhadap Pembentukan Federasi Malaysia*, Yogyakarta, IKIP Sanata Dharma, hlm. 48.

dibantu oleh Negara Inggris dan Australia. Presiden Soekarno mengirimkan tentara Indonesia dan para sukarelawan ke Kalimantan Utara dan Malaya. Kebijakan Presiden Soekarno dalam menentang pembentukan Federasi Malaysia terkenal dengan sebutan “ganyang Malaysia”.⁴ Akan tetapi peristiwa G/30/S/PKI tahun 1965 telah mengakibatkan terjadinya perubahan politik di Indonesia. Presiden Soekarno kemudian digantikan oleh Soeharto yang dengan cepat berhasil mengatasi keadaan yang tidak menentu di Indonesia. Presiden Soeharto kemudian menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Perubahan kebijakan politik Indonesia ternyata membawa pengaruh yang signifikan dalam mengakhiri konflik militer antara Indonesia dengan Malaysia. Normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dilakukan demi terciptanya perdamaian antar kedua negara yang bertetangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi obyek penulisan ini.

Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan federasi Malaysia tahun 1963?
2. Bagaimana penyelesaian konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia?

⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

C. TUJUAN PENULISAN

Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan federasi Malaysia tahun 1963
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia.

D. MANFAAT PENULISAN

- a. Bagi Universitas Sanata Dharma

Makalah ini diharapkan dapat memberi kekayaan khasanah yang berguna bagi pembaca dan pemerhati sejarah di lingkungan Universitas Sanata Dharma secara umum dan secara khusus untuk program studi pendidikan sejarah.

- b. Bagi Perkembangan Pengetahuan

Penulisan makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sejarah tentang kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan federasi Malaysia tahun 1963.

- c. Bagi Pembaca

Makalah ini diharapkan mampu menarik minat pembaca untuk mempelajari tentang sejarah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, khususnya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1963.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Makalah yang berjudul “kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan federasi Malaysia tahun 1963” ini mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I. Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.
- Bab II. Bab ini menyajikan tentang kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan federasi Malaysia tahun 1963.
- Bab III. Bab ini menyajikan tentang penyelesaian konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia
- Bab IV. Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada Bab II dan III.

BAB II
KEBIJAKAN PRESIDEN SOEKARNO
TERHADAP PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA
TAHUN 1963

Presiden Soekarno pada awalnya tidak menentang rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang diprakarsai oleh pemerintah kolonial Inggris. Pemerintah Indonesia memahami bahwa pembentukan negara Federasi Malaysia merupakan proses politik yang harus segera dilakukan. Rakyat di Kalimantan Utara sudah sewajarnya mendapatkan kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat lepas dari kekuasaan kolonial Inggris. Akan tetapi proses pembentukan negara Federasi Malaysia di Kalimantan Utara mendapatkan tentangan dari faksi politik di daerah tersebut. Partai Rakyat Brunai yang dipimpin oleh Sheikh Azhari dengan keras menentang kebijakan politik pemerintah kolonial Inggris. Sebagai seorang tokoh politik, Sheikh Azhari telah memprogramkan garis perjuangan bagi partainya untuk mengusir pemerintah kolonial Inggris dari Kalimantan Utara.⁵

A. Reaksi Pemerintah Indonesia Terhadap Negara Federasi Malaysia

Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia memang tidak harmonis dan selalu mengalami fluktuasi politik. Sejak dari awal berdirinya Persekutuan Tanah Melayu (PTM) hingga menjadi negara federasi keduanya tidak bisa mempercayai

⁵Efantino Febriana dan Arifin, *op. cit.*, hlm. 33.

satu sama lain. Berbagai macam persoalan yang mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia antara lain:⁶

1. Presiden Soekarno sangat kecewa terhadap wakil PTM di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengambil langkah abstain dalam pemungutan suara tentang nasib Irian Jaya.
2. Pemerintah Indonesia mencurigai keterlibatan Malaya dalam pemberontakan PRRI dan Permesta yang terjadi di Indonesia tahun 1958.
3. Adanya perbedaan pendapat yang esensial mengenai masalah keamanan regional. Negara Indonesia menganggap bahwa kolonialis merupakan ancaman yang mendasar bagi eksistensi suatu negara. Sedangkan Negara Federasi Malaysia berpandangan bahwa komunis merupakan ancaman yang sangat serius.

Pembentukan negara Federasi Malaysia yang akan dilakukan oleh kolonial Inggris yang meliputi Kalimantan Utara telah mengundang reaksi pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno menanggapi rencana kolonial Inggris mengatakan bahwa Inggris sudah sepatutnya memerdekakan jajahannya. Akan tetapi wilayah Kalimantan Utara supaya menjadi negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Pemerintah Indonesia tidak menyetujui wilayah Kalimantan Utara menjadi bagian dari negara Federasi Malaysia. Statmen Presiden Soekarno tersebut dinilai oleh pemerintah kolonial Inggris sebagai manuver politik untuk menguasai Kalimantan Utara. Keadaan seperti ini telah menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak.⁷

Bersamaan dengan memanasnya situasi politik tersebut, di wilayah Kalimantan Utara terutama di Brunai timbul pemberontakan bersenjata. Pada tanggal 8 Desember 1962, Sheikh Azhari sebagai pemimpin Partai Ra'ayat

⁶ A. Kardiya Wiharyanto, *op. cit.*, hlm. 46.

⁷ *Ibid.*, hlm. 48

memproklamasikan negara kesatuan Kalimantan Utara. Negara yang diproklamasikan tersebut meliputi wilayah Sabah, Brunai dan Serawak. Ia sendiri memimpin langsung pemberontakan untuk mengusir penjajah Inggris dari Kalimantan Utara. Untuk memuluskan perjuangannya, Sheikh Azhari membentuk Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). Ia sendiri sebenarnya masih loyal terhadap Sultan Brunai, akan tetapi kolonial Inggris masih berkuasa telah mendorongnya untuk memberontak. Ia dengan keras tetap menolak gagasan kolonial Inggris yang akan memasukan wilayah Kalimantan Utara dalam negara Federasi Malaysia.⁸

Pemerintah kolonial Inggris mengerahkan kekuatan militernya yang terdiri dari pasukan Gurkha dan Komando Timur Jauh Inggris (*British Far Eastern Command*) ke wilayah konflik. Militer Inggris berusaha secepatnya untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Sheikh Azhari. Mendapatkan serangan militer yang jauh lebih unggul dalam persenjataan telah mengakibatkan TNKU yang dipimpin oleh Sheikh Azhari tertekan. Ia dan pasukannya dikejar-kejar oleh militer Inggris sebagai pemberontak yang harus ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Hal ini dengan secepatnya harus dilakukan supaya api pemberontakan tidak menjalar ke wilayah lainnya.⁹

Sheikh Azhari dan pasukannya secara militer dapat dikalahkan dengan cepat oleh serdadu Inggris. Akan tetapi secara politik, Sheikh Azhari telah

⁸ Hidayat Mukmin, 1991, *TNI Dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia Malaysia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 90.

⁹ Efantino Febriana dan Arifin, *op. cit.*, hlm. 38.

membuka mata dunia bahwa pembentukan Federasi Malaysia mendapatkan tantangan yang serius. Sebagian rakyat Kalimantan Utara menghendaki kemerdekaan yang penuh dari kolonial Inggris. Presiden Soekarno bersimpati terhadap perjuangan Sheikh Azhari dan pasukannya yang telah berani melawan pihak kolonial Inggris. Sikap simpati yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara ini cukup beralasan.¹⁰

Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Federasi Malaysia akan dipergunakan sebagai basis asing yang akan merongrong eksistensi negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno sangat khawatir posisi negara Indonesia yang terjepit di antara musuh-musuh *Oldefo*.¹¹ Negara tersebut yaitu di sebelah selatan ada negara Australia dan Selandia Baru, sedangkan di sebelah utara ada Malaysia. Presiden Soekarno sangat benci terhadap negara-negara *Oldefo*. Bahkan ia dengan lantang meriakan seruan “*go to hell with your aids*” (persetan dengan bantuanmu).¹²

Sikap Presiden Soekarno yang bersimpati terhadap perjuangan Sheikh Azhari telah memanaskan hubungan diplomatik antara Jakarta dengan Kuala Lumpur. Pemimpin Malaysia Tengku Abdurrahman menjadi berang terhadap pemerintah Republik Indonesia. Ia menuding bahwa pihak Indonesia ada dibalik pemberontakan yang dilakukan oleh Sheikh Azhari. Kemudian Presiden Soekarno

¹⁰ A. Kardiyat Wiharyanto, *op., cit.*, hlm. 48.

¹¹ *Oldefo*: Old Estabilshet Forces. *Oldefo* merupakan negara-negara kapitalis yang maju dan Presiden Soekarno menganggap negara-negara tersebut sebagai imperialis.

¹² A. Kardiyat Wiharyanto, 2011, *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, hlm. 126.

menjawab tuduhan dari Malaysia dengan mengatakan bahwa: perjuangan rakyat Kalimantan Utara merupakan bagian dari perjuangan negara-negara “*the new emerging forces*” yang membenci penghisapan manusia oleh manusia. Pada tanggal 8 Januari 1963, pemerintah Indonesia secara resmi menolak pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno beranggapan bahwa federasi merupakan gagasan kolonial Inggris dan bukan gagasan rakyat Kalimantan Utara. Hal ini merupakan konfrontasi terhadap revolusi Indonesia.¹³

Presiden Soekarno sangat peka dan tajam dalam mencermati adanya unsur neokolonialisme dalam pembentukan negara Federasi Malaysia. Ia selaku seorang nasionalis sejati beranggapan bahwa negara Indonesia harus tetap yang terbesar dan kuat di Asia Tenggara. Nasionalisme dalam pandangan dirinya tidak mengenal adanya pesaing utama dalam kawasan ini. Terbius oleh kesuksesannya dalam mendapatkan Irian Barat telah memperkuat kepercayaan Presiden Soekarno untuk mengganyang Malaysia.¹⁴ Untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia telah mendorong negara Jepang untuk memfasilitasi perundingan. Kemudian pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 1963 diadakan perundingan di Tokyo. Perundingan ini dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman. Tujuan perundingan Tokyo adalah untuk menghilangkan kecurigaan mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia. Pada perundingan yang berlangsung di Tokyo ini mereka sepakat untuk

¹³ Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 91.

¹⁴ Lambert J. Giebels, 2005, *Pembantaian yang Ditutup-Tutupi Peristiwa Fatal Disekitar Kejatuhan Bung Karno*, Jakarta, Grasindo, hlm. Xxvii.

kembali ke semangat kerjasama dan persahabatan sebagai bangsa yang serumpun. Mereka berkomitmen untuk memelihara perdamaian dan tidak akan menyerang satu sama lain.¹⁵

Pertemuan Tokyo ini kemudian ditindak lanjuti dengan pertemuan tingkat kementerian luar negeri dari masing-masing negara. Pada tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 11 Juni 1963 berlangsung pertemuan tingkat menteri luar negeri di Manila. Pertemuan Manila ini bertujuan untuk merumuskan lebih lanjut kesepakatan Tokyo. Adapun pertemuan di Manila ini dihadiri oleh:

- a. Subandrio selaku Menteri Luar Negeri dan juga merangkap sebagai Wakil Perdana Menteri I Republik Indonesia.
- b. Tun Abdul Razak selaku Menteri Luar Negeri dan juga merangkap sebagai Deputy I Perdana Menteri Malaya.
- c. Immanuel Pelaez selaku Menteri Luar Negeri dan juga merangkap sebagai Wakil Presiden Filipina.

Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ini diperoleh suatu kejelasan sikap politik Indonesia dan Filipina. Keduanya tidak keberatan atas rencana pembentukan negara Federasi Malaysia asalkan disesuaikan dengan hak penentuan nasib sendiri oleh rakyat setempat. Dalam hal ini pihak PBB selaku otoritas yang bebas dan tidak berpihak (independen) yang harus menyelenggarakan referendum.¹⁶

Pertemuan Manila juga memuat gagasan Presiden Filipina Macapagal untuk membentuk organisasi antara ketiga negara dengan nama Maphalindo (Malaysia-Filipina-Indonesia). Maphalindo ini langsung mendapatkan tanggapan dari

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁶ Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 94.

Amerika Serikat, Inggris dan juga Republik Rakyat China. Pada perkembangannya Maphalindo ini mati sebelum berkembang karena Filipina bersikeras mengklaim Sabah sebagai miliknya. Di samping itu, memanasnya keadaan akibat pecahnya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia.¹⁷ Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri kemudian diperkuat dengan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi antara Presiden Soekarno, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman dan Presiden Macapagal.

KTT Manila ini berlangsung dari tanggal 31 Juli sampai dengan 1 Agustus 1963 yang menghasilkan solusi bagi pemecahan Malaysia, diantaranya:¹⁸

- a. Federasi Malaysia tidak akan dibentuk sebelum hak penentuan nasib sendiri dari rakyat Kalimantan Utara dilaksanakan.
- b. Sekertaris Jenderal PBB yang menyelenggarakan referendum.
- c. Penduduk Sabah atau Serawak yang berada di luar Kalimantan Utara harus diberi hak suara untuk menyalurkan aspirasinya.
- d. PBB akan mengirimkan tim pekerjaannya untuk melangsungkan referendum dan pihak Indonesia, Malaya dan Filipina diperbolehkan mengirimkan tim peninjau ke Kalimantan Utara selama referendum.

Sementara itu, Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal juga mengadakan perundingan bilateral dan menyepakati sebuah doktrin. Doktrin Soekarno-Macapagal ini memuat isi tentang penegasan bahwa masalah Asia supaya diselesaikan oleh bangsa Asia sendiri. Doktrin ini langsung ditentang oleh Amerika Serikat dan Inggris, karena dinilai dapat mengagalkan rencana pembentukan Federasi Malaysia. Menanggapi hal tersebut, kemudian anasir

¹⁷ A. Kardiyat Wiharyanto, *op., cit.*, hlm. 51

¹⁸ Efantino Febriana dan Arifin, *op., cit.*, hlm. 43.

intelejen Inggris dan Malaya segera melansir berita bahwa Federasi Malaysia segera akan dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1963.¹⁹

Berita ini telah memanasakan situasi di Asia Tenggara dan memaksa Sekjend PBB U Thant segera mengirimkan misi ke Kalimantan Utara untuk menggelar jajak pendapat. Tim PBB ini diketuai oleh Laurence Michelmore dari Amerika Serikat dan beranggotakan:

1. George Janicek dari Cekoslowakia
2. George Howard dari Argentina
3. Neville Kanakarathne dari Ceylon
4. Kenneth Dadzie dari Ghana
5. Ishad Bagai dari Pakistan
6. Jasushi Akashi dari Jepang
7. Abdul Dajani dari Yordania
8. Jose Machado dari Brazilia

Tim peninjau dari Malaya beranggotakan:

1. Zaiton Ibrahim
2. Athi Nahappan
3. Yakub Latif
4. Mohammad Zahir

Tim Peninjau dari Filipina beranggotakan:

1. Benito M. Bautista
2. Melquiades Ibanez
3. Vicente Muyoo
4. Ramon Barrios

Sedangkan tim dari Indonesia beranggotakan:

1. Nugroho
2. Otto Abdulrahman
3. Teuku Hasan
4. Rudi Gonta

Misi tim PBB yang dipimpin oleh Laurence Michelmore dari Amerika Serikat ini disinyalir telah direayasa demi keuntungan Inggris bagi terwujudnya Federasi Malaysia. Untuk meredakan ketegangan dengan pihak Indonesia, maka

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 44

Kuala Lumpur menunda pengumuman deklarasi Federasi Malaysia sampai tanggal 16 September 1963.²⁰

Jajak pendapat yang dilakukan oleh tim PBB di Kalimantan Utara hasilnya diumumkan pada tanggal 14 September 1963. Hasil jajak pendapat tersebut adalah bahwa sebagian besar rakyat Sabah dan Serawak memilih bergabung dalam Federasi Malaysia. Pihak Indonesia tidak dapat menerima hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh misi tim PBB tidak sah dan penuh dengan kecurangan. Hal ini nampak dengan dipersulitnya tim peninjau dari Indonesia yang dipersulit oleh Inggris untuk memasuki wilayah Sabah dan Serawak. Di samping itu, jumlah petugas PBB juga dibatasi oleh Inggris dan tidak sebanding dengan luas daerah yang harus diawasi. Presiden Soekarno menilai bahwa pemerintah Indonesia telah dipecundangi habis-habisan. Pada tanggal 16 September 1963, Tengku Abdul Rahman memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia yang meliputi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Serawak. Proklamasi Federasi Malaysia mendapatkan reaksi yang cukup keras dari pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno menuduh Tengku Abdul Rahman telah mengkhianati kesepakatan KTT Manila.²¹

B. Konfrontasi Terhadap Malaysia

Berdirinya Federasi Malaysia diterima oleh pihak pemerintah Indonesia sebagai adanya itikad buruk (*act of bad faith*), atau sebagai tindak tidak

²⁰ Hidayat Mukmin, *op., cit*, hlm. 95.

²¹ *Idem.*

bersahabat (*unfriendly act*) terhadap bangsa Indonesia. Pada awalnya bentuk konfrontasi hanya berwujud demonstrasi-demonstrasi dan pernyataan politik. Kedutaan Besar Malaya dan Inggris di Jakarta didemo besar-besaran oleh rakyat Indonesia. Sementara itu di Kuala Lumpur juga terjadi demo anti Indonesia, para demonstran menyerbu gedung KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia). Para demonstran merobek-robek foto Presiden Soekarno dan mengeluarkan lambang negara Garuda Pancasila dan membawanya ke hadapan Tengku Abdul Raman yang dipaksa untuk menginjak-injaknya.²²

Peristiwa tersebut telah mengakibatkan amarah Presiden Soekarno terhadap Malaysia memuncak. Pada tanggal 17 September 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan politik dengan memutuskan hubungan diplomati terhadap Kuala Lumpur. Ia menjadi murka dan mengutuk dengan keras tindakan Tengku Abdul Rahman tidak dapat diterima karena sudah melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Presiden Soekarno kemudian melancarkan sebuah gerakan yang terkenal dengan sebutan “ganyang Malaysia”. Ia memang sangat pandai dalam membuat propaganda dihadapan rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 September 1963, munculah demonstrasi anti Malaysia yang mengusung spanduk bertuliskan “ganyang Malaysia”, “gantung Tengku Abdul Rahman” antek kolonial.²³

²² Efantino Febriana dan Arifin, *op., cit.*, hlm. 45.

²³ *Idem.*

Kantor Kedutaan Besar Inggris menjadi berantakan karena dirusak oleh para demonstran. Sementara itu kaum buruh Indonesia menduduki dan mengambil alih berbagai macam perusahaan dan perkebunan milik Inggris. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 194 Tahun 1963 yang memuat: Semua perusahaan yang bukan perusahaan minyak diserahkan kepada kementerian sesuai bidangnya. Pada tanggal 21 September 1963, dimensi konfrontasi ekonomi mengemuka dengan dikeluarkannya perintah penghentian semua hubungan lalu lintas perekonomian dengan Malaya dan Singapura. Sebagai tindak lanjut dari konfrontasi ekonomi, pemerintah Indonesia menetapkan Belawan, Makassar dan Tanjung Priok sebagai “*free trade zone*”.²⁴

Presiden Soekarno mengkomandokan gerakan sukarelawan pada Konperensi Presidium Kabinet dengan Catur Tunggal seluruh Indonesia. Pada tanggal 28 April 1964 diselenggarakan sidang Komando Operasi Tertinggi (KOTI) di Istana Merdeka. KOTI mempunyai tugas pokok: Operasi pengamanan terhadap pelaksanaan program pemerintah pada umumnya, khususnya dibidang konfrontasi terhadap unsur-unsur kolonialisme/imperialisme dalam segala manifestasinya serta pengamanan terhadap pelaksanaan program ekonomi. Hal ini harus dilakukan demi stabilitas keamanan yang dapat dikendalikan. KOTI dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tinggi ABRI (Angkatan Bersenjata

²⁴ Hidayat Mukmin, *op., cit*, hlm. 97.

Republik Indonesia) dengan seorang Kepala Staf yang membawahi Staf Gabungan (G) yang terdiri dari:²⁵

- a. G-I : Intelijen
- b. G-II: Operasi
- c. G-III: Pengerahan Tenaga
- d. G-IV: Logistik
- e. G-V: Politik, Ekonomi dan Sosial.

Pada tanggal 3 Mei 1963, Presiden Soekarno mencanangkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat). Dwikora ini berisi:

1. Memperhebat ketahanan revolusi Indonesia.
2. Membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai.

Presiden Soekarno yang kharismatik mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Ia menekankan bahwa tujuan Dwikora bukan untuk memusuhi serumpun bangsa Melayu tetapi untuk mengusir kolonialis Inggris dari Asia. Presiden Soekarno memerintahkan kepada Kolonel Sabirin Mochtar untuk membentuk Brigade Sukarelawan Tempur Dwikora (BSTD). BSTD ini berfungsi untuk menunjang konfrontasi militer disepanjang garis perbatasan Kalimantan Utara dan di Semenanjung Malaya.²⁶

Untuk memperkuat kedudukan tentara Indonesia di Kalimantan Timur juga dibentuk satu Batalyon Raider Dayak. Pembentukan batalyon ini dipimpin langsung oleh Mayjend Hario Kecik selaku Pandam IX Mulawarman. Kesatuan Raider Dayak ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai kesatuan militer yang siap tempur dan juga bertugas membangun kesadaran kepada suku-suku Dayak

²⁵ Efantino Febriana dan Arifin, *op., cit*, hlm. 48.

²⁶ *Idem*.

yang berada di pedalaman. Mereka memberikan wawasan nasionalis sebagai warga negara Indonesia. Mereka juga diminta kesiapsediaannya untuk membelah negara yang sedang terancam oleh kekuatan musuh dari utara.²⁷

Sejak dicanangkan Dwikora, Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) mulai aktif melakukan operasi udara di wilayah Sumatera, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Semenanjung Malaya. Pelaksanaan operasi udara oleh AURI ini bertujuan untuk:

1. Melakukan pengintaian dan pemotretan udara di Malaysia Barat dan Timur serta laut Jawa.
2. Pemeriksaan *Reaction Time* lawan di Singapura dan Jeseltron.
3. Melakukan penerjunan AURI di daerah lapis serta Hilir Kuala Lumpur.

Adapun yang menjadi target dari Operasi oleh AURI ini adalah:

1. Semenanjung Malaysia: Kuala Lumpur, Port Swittenham dan Malaecea. Penyerangan ke wilayah ini AURI menggunakan Pangkalan Angkatan Udara (PAU) Medan.
2. Wilayah Singapura: Singapura Kota, Pelabuhan Singapura. Misi penyerangan ke Singapura AURI menggunakan PAU Tanjung Balai Karimun dan Pulau Penuha.
3. Wilayah Kalimantan Utara: Labuhan Jesselton Airfield, Kuching, Tawao Airfield. AURI menggunakan pangkalan Bulutambang, Kemayoran, Iswahyudi dan Waru.

Komando operasi udara AURI dipimpin oleh Pangkostraga (Panglima Komando Strategi Udara Siaga) Laksamana Madya Oemar Dani yang berkedudukan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. AURI telah mempersiapkan hampir seluruh pesawat tempurnya, seperti: TU-16/TU-16KS, C-130/ Herkules, C-47 Dakota, B-25/B-26, P-51 Mustang, helikopter Turbo Prof dan juga UFI/2 Albatros. Kekuatan AURI ini harus berhadapan dengan Angkatan

²⁷ Hario Kecik, 2009, *Pemikiran Militer 2 Sepanjang Masa Bangsa Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor, hlm. 207

Udara Inggris dan Australia. Kekuatan gabungan Inggris dan Australia ini mengerahkan 50-an bomber, 24 Hawker Hunter, 24 Gloster Javelin, 30 F-86 Sabre, 6 skadron pesawat angkut, 12 helikopter, skadron rudal Blood Hound. Kekuatan tersebut masih didukung dengan pasukan darat yang terdiri dari 27 batalion infanteri, 16 batalion artileri dan juga pasukan Gurkha.²⁸

Inggris telah menempatkan setengah armada perang angkatan lautnya di perairan sekitar Malaysia, Singapura dan Kalimantan Utara. Sedangkan pasukan darat Inggris sebanyak 6000 personel dengan persenjataan lengkap telah disiagakan diperbatasan Kalimantan Utara. Di samping itu juga terdapat serdadu darat dari Malaysia yang personelnnya juga sangat banyak. Dari segi perbandingan militer dalam konfrontasi ini kekuatan musuh mempunyai kemampuan yang unggul dibandingkan dengan kekuatan Indonesia. Dari segi perbandingan kekuatan militer ini, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mengalahkan musuhnya. Akan tetapi pihak musuh juga tidak dapat mengalahkan militer Indonesia dengan mudah. Hal ini karena pihak Indonesia telah siap untuk melakukan perang gerilya dalam jangka waktu yang panjang.²⁹

Operasi darat diperbatasan dengan Kalimantan Utara dipimpin oleh Pangkopur (Panglima Komando Tempur) Brigadir Jenderal Suparjo. Para gerilyawan dari gerakan kemerdekaan Kalimantan Utara mendapatkan dukungan moral dan material dari Indonesia. Brigadir Jenderal Suparjo juga melakukan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁹ Hidayat Mukmin, *op., cit.*, hlm. 99.

perekrutan sukarelawan dari Serawak yang tergabung dalam PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Serawak). Perekrutan ini dilatih kemiliteran dan dipersenjatai yang kemudian dikirim ke daerah asalnya dan membantu militer Indonesia dalam melakukan operasi. Sheikh Azhari sendiri muncul di muka publik di Pontianak Kalimantan Utara ketika Dr Subandrio berkunjung ke daerah tersebut.³⁰

Hal ini merupakan sinyalemen bahwa pemerintah Indonesia memberi restu bagi perjuangan kemerdekaan Kalimantan Utara. Pangkopur Brigjend Suparjo juga memerintahkan kepada penduduk Dayak di sepanjang perbatasan untuk membuat lubang di belakang rumah untuk pertahanan. Sungai Kapuas dijadikan urat nadi mobilisasi pasukan darat Indonesia menuju perbatasan Malaysia bagian barat. Pasukan Indonesia sering terlibat baku tembak dengan tentara musuh yang telah bersiap dibelakang garis perbatasan. Garis perbatasan Malaysia di Kalimantan Utara dijaga oleh tentara Gurkha yang berasal dari India.³¹

Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Siaga (Kolaga) untuk mengendalikan kegiatan konfrontasi terhadap Malaysia. Laksamana Madya Omar Dani dipercaya menjabat sebagai Pangkolaga (Panglima Komando Mandala Siaga). Kolaga ini terdiri tiga bagian yaitu:

1. Komando Tempur Satu (Kopurtu) yang dipimpin Brigjend Kemal Idris. Kopurtu berkedudukan di Sumatera dengan kekuatan 12 Batalyon Angkatan Darat, 3 Batalyon Para dan 1 Batalyon KKO.

³⁰ Rosihan Anwar, 2006, *Sukarno-Tentara-PKI: Segi Tiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*, Yogyakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 270.

³¹ Gurkha adalah serdadu militer bayaran yang dipakai oleh Inggris sejak Perang Dunia II. Serdadu ini berasal dari penduduk Nepal yang bermukim di kaki pegunungan Himalaya. Mereka mempunyai ketahanan fisik yang kuat dan tangguh dalam berperang.

2. Komando Tempur Dua (Kopurda) yang dipimpin oleh Brigjend Soeparjo dan berkedudukan di Bengkayang Kalimantan Barat. Kopurda ini berkekuatan 13 Batalyon yang terdiri dari unsur KKO, AURI dan RPKAD (Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat)
3. Komando Armada Siaga yang berkedudukan di Riau dan Kalimantan Timur dengan kekuatan yang terdiri dari unsur AL, KKO, Brigade Pendarat.

Pada tanggal 17 Agustus dan 2 September 1964, pasukan Indonesia mulai giat melakukan penyerangan terhadap basis pasukan musuh. Pasukan terjun payung Indonesia yang dibantu oleh sukarelawan bersenjata dari Cina berhasil mendarat di Johor. Sementara itu di sepanjang perbatasan Kalimantan pasukan Indonesia dan para sukarelawan berhasil memasuki Serawak dan Sabah. Pada tanggal 2 Januari 1964, pasukan Indonesia mengadakan serangan mendadak ke pos polisi Inggris di Tawao. Pada penyerangan ini 8 tentara Inggris tewas dan 19 lain luka-luka.³²

Pada tanggal 18 September 1963, pesawat milik Angkatan Udara Inggris jenis Auster berhasil ditembak jatuh oleh pasukan Indonesia. Intelejen Inggris ternyata juga melakukan aksi mata terhadap kekuatan Indonesia dengan mengirim intelejennya. Ternyata pasukan Indonesia sangat jeli dalam melakukan pengawasan perbatasan sehingga mata-mata intelejen Inggris berhasil ditangkap. Sebuah helikopter Inggris yang berusaha menyerang basis pasukan Indonesia juga berhasil ditembak jatuh di daerah Lundu. Eskalasi konfrontasi militer semakin meningkat dan memaksa Tengku Abdul Rahman bersedia mengadakan perundingan dengan Indonesia. Konflik antara Indonesia dengan Malaysia

³² Efantino Febriana dan Arifin, *op., cit.*, hlm. 53.

ternyata mengundang perhatian Amerika Serikat. Robert Kennedy sebagai wakil utusan dari Amerika Serikat berusaha bertindak sebagai penengah untuk mengakhiri konflik. Namun perundingan mengalami jalan buntu dan konflik bersenjata semakin meningkat.³³

Konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia yang semakin seru ternyata mengundang keterlibatan Australia. Pada bulan Juni 1964, Australia mengirimkan tentaranya yang tergabung dalam *Spesial Air Service*. Pasukan ini berbasis di Kalimantan Utara dan sering terlibat kontak senjata dengan gerilyawan Indonesia. Mayor Jenderal Walker selaku komandan pasukan Inggris mengakui bahwa personil militernya menghadapi kesulitan melawan gerilyawan Indonesia. Ia menjalankan tipu muslihat kepada gerilyawan Indonesia untuk menghentikan serangan selama berlangsungnya perundingan di Tokyo yang membahas perdamaian. Gerilyawan Indonesia mematuhiinya, akan tetapi secara tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Inggris. Serangan yang mendadak ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 10 gerilyawan Indonesia gugur. Mereka gugur di medan perang sebagai pahlawan kusuma bangsa.

Peristiwa ini telah membulatkan tekad para gerilyawan Indonesia untuk membalas kepicikan tentara Inggris. Intensitas pertempuran antara gerilyawan Indonesia dengan tentara Inggris dalam medio Juni 1964 telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Gerilyawan Indonesia berhasil menewaskan 57 tentara Inggris, 31 hilang dan 12 lainnya luka-luka. Kekuatan tempur pasukan Indonesia

³³ *Ibid*, hlm. 54

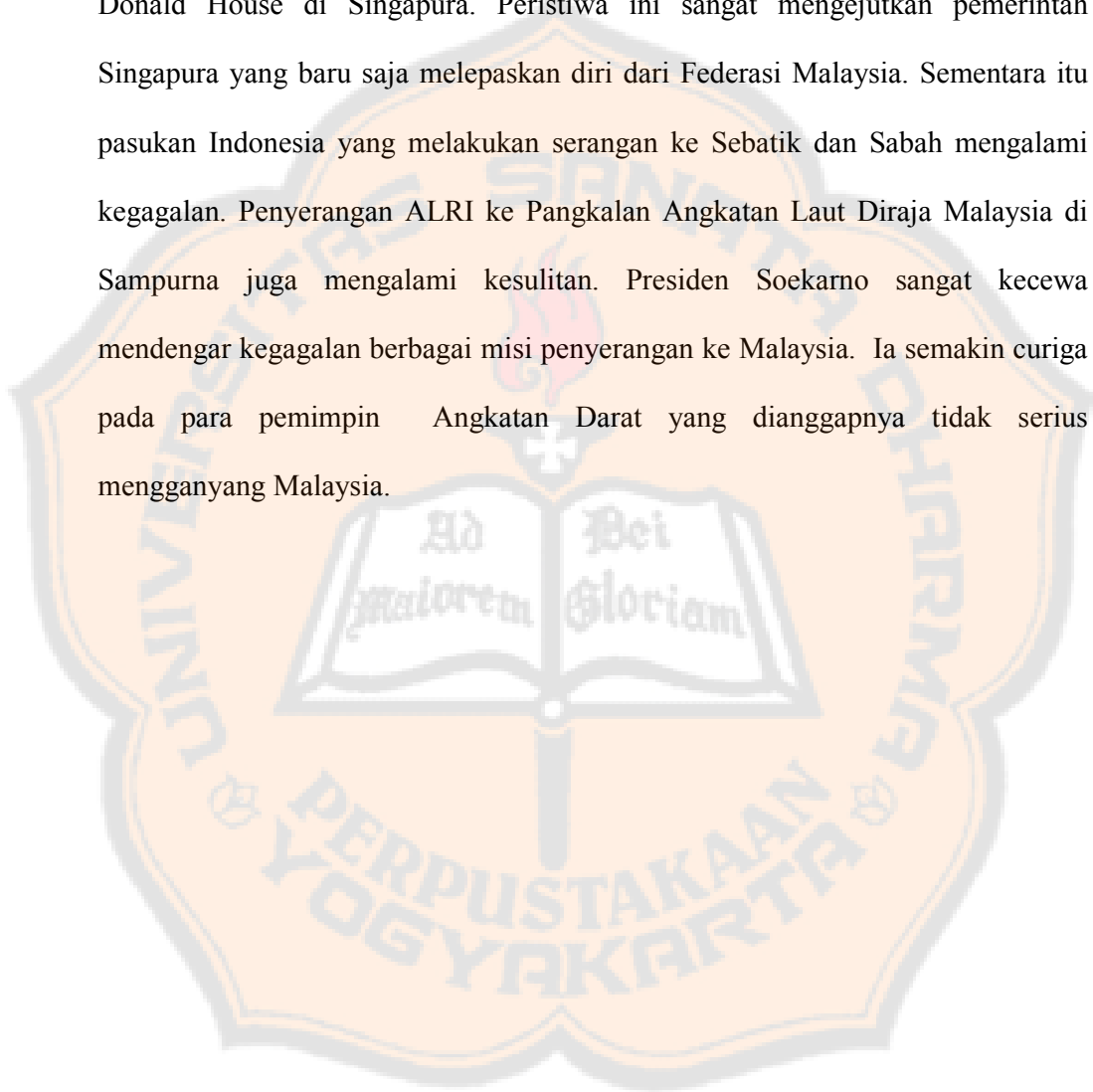
semakin meningkat dengan datangnya bantuan helikopter anti kapal selam dari Uni Soviet sebanyak 58. Pada tanggal 28 Februari 1965, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Siaga (Kolaga) untuk menggantikan Komando Siaga (Koga). Panglimanya tetap dijabat oleh Laksamana Omar Dani, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Wakil Panglima I, Brigadir Jenderal Mulyadi sebagai Wakil Panglima II, Laksamana Dua Leo Watimena sebagai Kepala Staf Kolaga.³⁴

Perubahan struktur komando ternyata mempengaruhi kondisi pertempuran antara gerilyawan Indonesia melawan musuh-musuhnya. Pihak Indonesia sering mengalami kekalahan, bahkan persembunyian gerilyawan Indonesia dengan mudah terdeteksi oleh pasukan Inggris. Kemudian pihak AURI mengalami kerugian besar dengan hilangnya pesawat Hercules C-130 B dan pesawat T-1306. Hal yang bertolak belakang telah dilakukan oleh Mayjend Soeharto selaku Wakil Kolaga telah berusaha menghambat konfrontasi. Ia memerintahkan kepada Kolonel Ali Murtopo selaku kepala operasi khusus untuk menjalin kontak dengan Malaysia. Nampaknya elit militer Angkatan Darat Indonesia di Jakarta tidak tertarik untuk mengeskalasi konfrontasi militer. Hal ini terjadi karena elit Angkatan Darat beranggapan bahwa personelnya tidak akan mampu menghadapi perang terbuka melawan Malaysia, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Brigjend Suparjo selaku komandan pasukan Indonesia di Kalimantan Barat sangat kecewa karena operasinya disabotase dari belakang. Presiden Soekarno.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 60.

³⁵ *Ibid*, hlm. 62.

Pada tanggal 10 Maret 1965, dua orang anggota personel KKO masing-masing Kopral Usman dan Harus berhasil melakukan misi pengeboman McDonald House di Singapura. Peristiwa ini sangat mengejutkan pemerintah Singapura yang baru saja melepaskan diri dari Federasi Malaysia. Sementara itu pasukan Indonesia yang melakukan serangan ke Sebatik dan Sabah mengalami kegagalan. Penyerangan ALRI ke Pangkalan Angkatan Laut Diraja Malaysia di Sampurna juga mengalami kesulitan. Presiden Soekarno sangat kecewa mendengar kegagalan berbagai misi penyerangan ke Malaysia. Ia semakin curiga pada para pemimpin Angkatan Darat yang dianggapnya tidak serius mengganyang Malaysia.



BAB III

PENYELESAIAN KONFRONTASI MILITER

ANTARA INDONESIA-MALAYSIA

Berbagai pihak berupaya membantu untuk menyelesaikan konflik bersenjata antara Indonesia dengan Malaysia. Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson sangat prihatin dengan konflik yang berlarut-larut. Ia sangat khawatir dengan konflik bersenjata yang semakin meningkat akan mengakibatkan perang besar di Asia Tenggara. Amerika Serikat telah mengidentifikasi keterlibatan negara lain dalam konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Untuk meredakan konflik, kemudian diutuslah Jaksa Agung Robert Kennedy untuk menjembatani terjadinya perdamaian.³⁶

Robert Kennedy berhasil menggelar perundingan antara Presiden Soekarno dengan Tengku Abdul Rahman di Tokyo. Pertemuan Tokyo menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan kontak senjata atau gencatan senjata. Pemerintah Indonesia menyetujui penghentian tembak menembak dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan Malaysia lewat perundingan. Namun pemerintah Malaysia berpandangan lain dalam menilai kesepakatan gencatan senjata. Pemerintah Malaysia menyebarkan selebaran kertas dari udara yang berisi agar tentara Indonesia menyerah dan mengibarkan bendera putih.³⁷

Pemerintah Indonesia menentang keras tindakan tentara Malaysia yang mencoba mengoyahkan tentara Indonesia. Dalam gencatan senjata itu hanya diperintahkan supaya tentara Indonesia berada di tempatnya semula tanpa harus

³⁶ Rosihan Anwar, *op. cit*, hlm. 271.

³⁷ Efantino Eebriana dan Arifin, *op.,cit*, hlm. 55.

mundur ke perbatasan. Mereka juga diperbolehkan untuk menembak apabila mendapatkan serangan dari musuh. Pemerintah Indonesia menuntut tentara Inggris supaya ditarik mundur dari Kalimantan Utara sebagai syarat perdamaian. Sebaliknya pemerintah Malaysia juga menuntut supaya tentara Indonesia ditarik mundur ke Indonesia sebagai syarat perdamaian.³⁸

Masing-masing pihak yang bertikai tidak ada yang mau mengalah. Tiadanya penyelesaian yang mendasar dan sikap saling membenarkan tindakannya sendiri-sendiri telah mengakibatkan genjatan senjata tidak berlaku efektif. Kegagalan gencatan senjata dalam pertemuan di Tokyo ternyata telah mendorong *peace feeler* untuk melakukan pendekatan diplomatik. Hal ini terus diusahakan untuk mencari terobosan dalam upaya mengakhiri konflik bersenjata antara Indonesia dengan Malaysia. Perkembangan yang terjadi di Indonesia maupun Malaysia ternyata berpengaruh terhadap proses perdamaian.³⁹

A. Faktor- faktor yang mempengaruhi penyelesaian konfrontasi Indonesia dengan Malaysia

1. Faktor internal Federasi Malaysia

Federasi Malaysia ternyata mempunyai kelemahan dalam struktur pemerintahan dan mengakibatkan timbulnya disintegrasi. Sebagian kalangan rakyat dan juga partai politik yang ada di Malaysia ternyata ada yang tidak menyetujui pembentukan Federasi. Singapura yang pada awalnya masuk dalam Federasi Malaysia ternyata memilih keluar dan menjadi negara yang merdeka.

³⁸ *Ibid*, hlm. 57.

³⁹ Hidayat Mukmin, *op., cit*, hlm. 114.

Hal ini disebabkan adanya pola pikir elit politik Malaysia yang masih rasialis menonjolkan etnis Melayu. Hanya para sultan Melayu yang dapat menduduki posisi sebagai “Yang Dipertuan Agung”. Pola pikir seperti ini sangat jelas menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan pola pikir elit politik Singapura yang multirasial. Mereka lebih mengedepankan kemajemukan ras untuk memperkuat nasionalisme dan demokrasi. Elit politik Singapura berpikiran bahwa kebijakan rasial yang selalu dikedepankan oleh elit politik Malaysia sangat berbahaya. Lee Kuan Yew salah satu tokoh elit politik Singapura melancarkan taktik membentuk Konvensi Solidaritas Malaysia. Ia terpaksa melakukan ini karena partai yang dipimpinnya PAP (*People’s Action Party*) bertentangan dengan UMNO (*United Malay National Organization*). Konvensi yang diadakan oleh Lee Kuan Yew ternyata ditentang oleh Mahatir bin Mohamed politikus UMNO. Pertentangan ini telah menyebabkan Lee Kuan Yew mengambil kebijakan politik dengan menyatakan bahwa Singapura memilih keluar dari Federasi Malaysia. Peristiwa politik ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 1965 dan Singapura menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Keluarnya Singapura dari federasi merupakan pukulan yang sangat telak bagi Kuala Lumpur. Federasi Malaysia kemudian mengambil kebijakan untuk segera mempercepat proses perdamaian dengan negara Indonesia. Kebijakan ini sangat beralasan karena ada rasa kekhawatiran apabila Singapura berafiliasi dengan Indonesia dan tentunya mengancam eksistensi Federasi Malaysia.

2. Faktor Internal Indonesia

Masalah dalam negeri yang menyelimuti pemerintahan Indonesia dengan adanya peristiwa “Gestapu” telah mempengaruhi proses penyelesaian konfrontasi. Upaya peninjauan penyelesaian konflik bersenjata sebenarnya sudah dimulai setahun sebelum peristiwa “Gestapu”. Gagalnya usaha perebutan kekuasaan yang menyebabkan meninggalnya elit militer Angkatan Darat Indonesia tidak serta merta mempercepat berakhirnya konfrontasi. Hal ini terbukti dengan bersikerasnya Presiden Soekarno untuk tetap meneruskan konfrontasi. Sementara itu kelompok mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam organisasi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) melancarkan aksi demonstrasi. Mereka mengusung tuntutan supaya pemerintah segera mengambil tindakan untuk.⁴⁰

- a. Membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia).
- b. Memperbaiki perekonomian nasional.
- c. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia.

Situasi dalam negeri Indonesia mengalami gejolak dengan timbulnya demonstrasi yang merasa tidak puas dengan keadaan pasca “Gestapu”. Seiring tersingkirnya PKI dari panggung perpolitikan nasional telah mengurangi dukungan politik ganyang Malaysia. Selama ini PKI sangat gigih mendukung Presiden Soekarno untuk menganyang Malaysia.

⁴⁰ Sulastomo, 2008, *Hari-hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru Sebuah Memoar*, Jakarta, Kompas, hlm. 223.

B. Penyelesaian Konfrontasi Militer Antara Indonesia Dengan Malaysia

Kalangan pejabat Kementerian Luar Negeri dan pihak intelejen Malaysia mulai menyadari bahwa kebijaksanaan bermusuhan dengan Indonesia harus segera diakhiri. Solusi dari konflik bersenjata segera mungkin harus segera diwujudkan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa di kalangan rakyat sipil. Pihak Malaysia mengetahui bahwa di Indonesia ada elemen yang mempunyai pola pikir searah untuk menyelesaikan konfrontasi. Kelompok ini adalah dari golongan bersenjata khususnya TNI-AD. Berbagai hal yang mendasari TNI-AD untuk segera menyelesaikan konfrontasi antara lain:⁴¹

1. Pertimbangan strategi militer.

Berdasarkan pemikiran militer yang mengedepankan strategi, TNI-AD telah memperhitungkan bahwa Indonesia tidak akan mungkin mematahkan kekuatan militer gabungan (Malaysia, Australia dan Inggris). Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak hanya menghadapi militer Malaysia tetapi juga militer Inggris dan kekuatan-kekuatan lainnya yang mendukung mereka. Mereka itu mempunyai kemampuan militer yang canggih dan tangguh. Sementara tentara Indonesia tidak mempunyai peralatan perang yang memadai untuk menandingi mereka. Bila perang terbuka pecah maka perang pasti akan berlangsung cukup lama dan akan menguras semua potensi nasional yang ada.

2. Pertimbangan politik.

Apabila terjadi perang terbuka maka kekuatan tempur ABRI akan dikirim ke luar Jawa. Kekosongan kekuatan militer akan sangat membahayakan keamanan

⁴¹ Hidayat Mukmin, *op., cit*, hlm. 113.

pemerintahan yang berpusat di Jakarta. Pihak ABRI merasa khawatir dengan situasi politik nasional yang cenderung didominasi oleh PKI. Kekosongan pasukan tempur di Jawa bukan mustahil akan dimanfaatkan oleh PKI untuk merebut kekuasaan.

3. Pertimbangan ekonomis.

Tentara Indonesia telah mempunyai pengalaman perang yang cukup berharga. Mulai dari memperebutkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan wilayah. Dalam peperangan sangat memerlukan biaya yang sangat tinggi. Sulit bagi bangsa Indonesia yang baru saja menyelesaikan konfrontasi militer dengan Belanda dalam memperebutkan Irian Barat kemudian harus berperang lagi dengan Malaysia. Perekonomian Indonesia dalam kondisi tidak stabil oleh karena itu tidak memungkinkan dalam waktu yang sekejap harus membiaya konfrontasi. Andaiapun bangsa Indonesia mendapatkan pinjaman dana dari luar negeri hanya akan memperberat beban perekonomian nasional.⁴²

Serangkaian upaya penyelesaian konfrontasi bersenjata antara Indonesia dengan Malaysia terus diupayakan. Segelintir elit ABRI khususnya dari TNI-AD berusaha mengupayakan terjadinya penyelesaian konflik secara damai. Pada dasarnya motivasi paling utama yang ada di kalangan elit TNI-AD adalah untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengakhiri konflik secepat mungkin. Memang harus diusahakan dengan kerja yang keras agar kedua belah pihak bersedia mengadakan perundingan dengan cara yang terhormat. Dengan cara yang

⁴² Adrian Vickers, 2005, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, hlm. 230.

sedemikian rupa ini diharapkan tanpa ada pihak yang merasa kehilangan muka dan tanpa saling menuduh siapa yang bersalah. Elit TNI-AD yang berperan dalam merintis penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia antara lain: Ahmad Yani, Soeharto, Ali Moertopo, L.B. Moerdani, A. Rahman Ramli, Soengeng Djarot, Yoga Soegomo dan Soeparjo Roestam. Sedangkan tokoh dari Malaysia yang berperan penting dalam penyelesaian konfrontasi dengan Indonesia antara lain: Tan Sri Muhamad Ghazali bin Shafei, Tun Abdul Razak dan Muhamad Sulong.⁴³

Pada bulan Januari 1964, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia Tan Sri Muhamad Ghazali bin Shafei berusaha menemui Mayjend Ahmad Yani di Hongkong. Kedua pejabat tersebut bertemu secara rahasia untuk menjajagi secara langsung kemungkinan diadakannya normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Mayjend Ahmad Yani memerintahkan Pangkostrad Brigjend Soeharto untuk menindak lanjuti pertemuan ini secara rahasia. Meninggalnya Mayjend Ahmad Yani pada tanggal 30 September 1965 telah menjadikan momen bagi Brigjend Soeharto untuk merintis perdamaian dengan Malaysia. Soeharto kemudian menugaskan Kolonel Ali Moertopo yang dibantu oleh Des Alwi, Yerri Semendap, Welly Pesik, Daan Mogot untuk menemui perwakilan dari Malaysia. Mereka ini merupakan warga sipil yang diberi mandat untuk menemui Tan Sri Muhamad Ghazali bin Shafei dan Tun Abdul Razak.

Pada tanggal 18 Desember 1965, Ali Moertopo cs mengadakan pertemuan dengan Tan Sri Muhamad Ghazali bin Shafei di Kuala Lumpur. Para pemimpin

⁴³ *Ibid*, hlm. 114

Malaysia sangat senang bahwa Indonesia dapat menumbangkan PKI yang selama ini merupakan salah satu kekuatan politik yang sangat mendukung konfrontasi. Tersingkirnya PKI dari kancah perpolitikan nasional telah membawa nuansa baru bagi proses normalisasi antara Indonesia dengan Malaysia. Pertemuan Kuala Lumpur ini membahas tentang kerjasama kedua bangsa dalam menghadapi komunisme. Pertemuan ini dimantapkan lebih lanjut dengan pertukaran perwira penghubung tetap. Letnan Kolonel L.B. Moerdani ditunjuk sebagai penghubung yang bertugas di Kuala Lumpur.

Sementara itu diangkatnya Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat telah meningkatkan pengaruhnya yang besar di dalam negeri. Bahkan, ia menyatakan dirinya sebagai pengemban “Supersemar” (Surat Perintah Sebelas Maret 1966) dari Presiden Soekarno. Supersemar bukan hanya memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, seperti: memelihara keamanan dan ketenangan serta stabilitas pemerintahan. Akan tetapi, Supersemar dipergunakannya sebagai landasan untuk mengawali penataan kembali hubungan luar negeri Indonesia. Dalam hal ini, Soeharto memprioritaskan untuk menormalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia secepatnya. Perubahan politik di Jakarta ternyata membawa pengaruh yang besar di lapangan pertempuran. Sejak Soeharto berhasil memegang kendali sebagai pengemban Supersemar intensitas kontak senjata turun drastis. Tentara

Indonesia yang berada di perbatasan dengan Malaysia tugasnya hanya menjaga perbatasan dan bukan untuk melakukan invasi militer.⁴⁴

C. Normalisasi Hubungan Antara Indonesia Dengan Malaysia

Situasi politik Indonesia semakin jelas dengan naiknya Soeharto sebagai pengemban Supersemar merupakan tonggak sejarah dimulainya perjuangan Orde Baru. Hal ini merupakan era baru bagi politik luar negeri Indonesia untuk melakukan reposisi dalam percaturan politik internasional. Salah satu langkah reposisi yang dilakukan oleh Soeharto adalah mengupayakan normalisasi hubungan kerjasama dan persahabatan dengan Malaysia. Pemerintah Malaysia sangat optimis bahwa perbaikan hubungan dengan Indonesia akan segera terwujud. Untuk menunjukkan kesungguhan hati pihak Indonesia dalam menormalisasi hubungan dengan Malaysia, Soeharto selaku pengemban Supersemar mengirimkan satu delegasi ke Kuala Lumpur. Misi delegasi Indonesia terkenal dengan nama misi muhibah dan mempunyai tugas untuk menemui Tun Abdul Razak dan Tengku Abdul Rahman dalam rangka persiapan Konperensi Bangkok. Misi perdamaian ini dipimpin oleh Laksamana Muda Laut O.B. Syaaf. Misi ini menunjukkan kepada Malaysia bahwa ABRI memprakarsai terwujudnya perdamaian.⁴⁵

Pada tanggal 20 Mei 1966, misi perdamaian Indonesia mendapatkan sambutan yang hangat dari para petinggi pemerintah dan juga rakyat Malaysia.

⁴⁴ Efantino Febriana dan Arifin, *op., cit*, hlm. 82.

⁴⁵ Hidayat Mukmin, *op., cit*, hlm. 131.

Tengku Abdul Rahman seolah-olah tidak mempercayai kedatangan rombongan militer Indonesia yang kabarnya membawa misi perdamaian. Ia sangat gembira menerima kedatangan rombongan dari Indonesia dan sebagai rasa syukurnya setiap anggota delegasi diberi tanda mata sebuah jam tangan *merk Rolek*. Misi muhibah ke Kuala Lumpur ini sifatnya untuk merintis dan menjajaki secara resmi pendapat elit politik Malaysia dalam kesediaannya berunding. Pertemuan Kuala Lumpur ini berlangsung dalam suasana yang penuh dengan keakraban tanpa ada perbedaan yang mendasar.⁴⁶

Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966 berlangsung konperensi di ibukota Thailand yaitu Bangkok untuk membahas prinsip-prinsip normalisasi hubungan. Delegasi pemerintah Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Sedangkan delegasi Malaysia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Kedua delegasi Indonesia dan Malaysia datang ke Bangkok dengan semangat persahabatan dan dengan penuh harapan akan segera selesainya konfrontasi. Pada perundingan awal terjadi perbedaan pendapat tentang status Sabah dan Serawak. Delegasi Indonesia dan Malaysia sepakat untuk tidak terlalu cepat mengambil keputusan mengenai masalah tersebut sebagai prasyarat normalisasi kedua bangsa. Konperensi Bangkok minimal dapat dijadikan sebagai sebuah landasan bagi persetujuan normalisasi hubungan. Konperensi Bangkok antara delegasi Indonesia dengan Malaysia menghasikan kesepakatan yang berisi:⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 134.

⁴⁷ Efantino Febriana dan Arifin, *op., cit*, hlm. 86.

1. Rakyat Sabah diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
 2. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
 3. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.
- Tun Abdul Razak selaku pemimpin delegasi Malaysia menyatakan secara

diplomatis bahwa Konferensi Bangkok telah meletakkan landasan perdamaian. Pada tanggal 7 Juni 1966, kabinet Malaysia menyetujui kesepakatan konferensi Bangkok. Sementara itu lain halnya yang terjadi di Indonesia, Presiden Soekarno marah kepada Adam Malik yang dianggapnya terlalu mudah berkapitulasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno menuduh Adam Malik sebagai seorang “*quick yilder*” dan mengantikan posisinya dengan Soeharto sebagai juru runding perdamaian. Pada tanggal 10 Juni 1966, Soeharto menerima kedatangan delegasi dari Malaysia yang dipimpin oleh Tan Sri Muhamad Ghazali bin Shafei. Mereka mengadakan pertemuan untuk membahas langkah-langkah yang perlu dipersiapkan sebelum penandatanganan persetujuan.⁴⁸

Pada tanggal 25 Juli 1966 berhasil dibentuk Kabinet Ampera dan Soeharto sebagai Presidiumnya. Ia menyatakan dalam sidang kabinet bahwa konfrontasi dengan Malaysia akan segera berakhir dalam waktu dua minggu. Selanjutnya tanggal 30 Juli 1966, pemerintah Indonesia memutuskan menyetujui hasil kesepakatan Bangkok. Persetujuan hubungan normalisasi hubungan antara Indonesia ditandatangani tanggal 11 Agustus 1966. Penandatanganan perdamaian ini dilaksanakan di Ruang Pancasila Gedung Deplu Pejambon. Perdamaian ini

⁴⁸Hidayat Mukmin, *op., cit.*, hlm. 138.

merupakan peristiwa sejarah yang mengandung serentetan upaya yang panjang, ulet dan rumit untuk mengakhiri konflik bersenjata antar dua negara yang masih serumpun. Upacara penandatanganan perdamaian dari pihak Malaysia diwakili oleh: Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak, Menteri Pertahanan Tan Sri Muhamad Ghazali bin Shafei dan juga pejabat dari Angkatan bersenjata Malaysia. Sedangkan di pihak Indonesia hadir antara lain: Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri, Jenderal Soeharto selaku Presidium Kabinet Ampera, Ali Moertopo, L.B. Moerdani dan beberapa perwira yang ikut merintis upaya perdamaian. Penadatangan persetujuan ini, maka otomatis berakhirilah konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang telah berlangsung selama tiga tahun. Bersamaan dengan penandatanganan piagam perdamaian, terjadi pula serah terima jabatan Direktur Operasi Malaysia Timur dari Inggris kepada Malaysia.⁴⁹

Indonesia dan Malaysia kemudian bekerjasama memberantas gerilyawan komunis yang masih melakukan aktivitas pengacuan keamanan di perbatasan kedua negara. Sisa-sisa gerombolan PGRS juga diatasi oleh masing-masing negara. TNI melakukan operasi militer untuk menumpas aktivis bersenjata PGRS yang tidak mau menyerahkan senjata. Kontak senjata tidak dapat dihindarkan sehingga terjadinya jatuh korban jiwa baik dipihak TNI maupun PGRS. TNI semakin meningkatkan operasi militernya sehingga gerakan pengacau keamanan dapat ditumpas. Dengan berhasilnya pembersihan kelompok gerilyawan komunis dan PGRS, maka wilayah keamanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dapat dijaga dengan baik. Berakhirnya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 140

telah menandai era baru kedua negara untuk memulai kerjasama yang lebih erat dalam semua aspek yang menguntungkan.⁵⁰



⁵⁰ Efantino Febriana dan Arifin, *op. cit.*, hlm. 92.

BAB IV

KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan tentang “Kebijakan Presiden Soekarno Terhadap Pembentukan Federasi Malaysia Tahun 1963” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963 diimplementasikan dengan konfrontasi militer. Ia menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai negara boneka kolonialis Inggris. Federasi Malaysia yang meliputi wilayah Kalimantan Utara disebutnya akan mengancam eksistensi negara Indonesia. Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia untuk membantu rakyat Kalimantan Utara melawan Inggris. Tentara Indonesia yang dibantu para sukarelawan harus menghadapi tentara Inggris dan Malaysia yang unggul dalam peralatan militer.
2. Penyelesaian konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia dapat dilakukan setelah adanya perubahan politik di Malaysia dan juga di Indonesia. Berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai ketua kabinet Ampera sekaligus pengembalian Supersemar dapat mengakhiri konfrontasi militer yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian damai 11 Agustus 1966 di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Efantino Febriana dan Arifin. 2009. *Ganyang Malaysia*. Yogyakarta: Bio Pustaka
- Elson, R.E. 2009. *The Idea of Indonesia*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Giebels, Lambert. 2005. *Pembantaian yang Ditutup-tutupi Peristiwa Fatal Disekitar Kejatuhan Bung Karno*. Jakarta: grasindo.
- Hario Kecik. 2009. *Pemikiran Militer 2 Sepanjang Masa Bangsa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hidayat Mukmin. 1991. *TNI Dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kardiyat Wiharyanto, A. 1989. *Reaksi Terhadap Pembentukan Federasi Malaysia*. Yogyakarta: IKIP Sanata Dharma.
- _____. 2011. *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Rosihan Anwar. 2006. *Sukarno-tentara-PKI : Segi Tiga Kekuasaan sebelum prahara politik 1961-1965*. Yogyakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Sulastomo. 2008. *Hari-hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru Sebuah Memoar*. Jakarta: Kompas.
- Vickers, Adrian. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.



LAMPIRAN

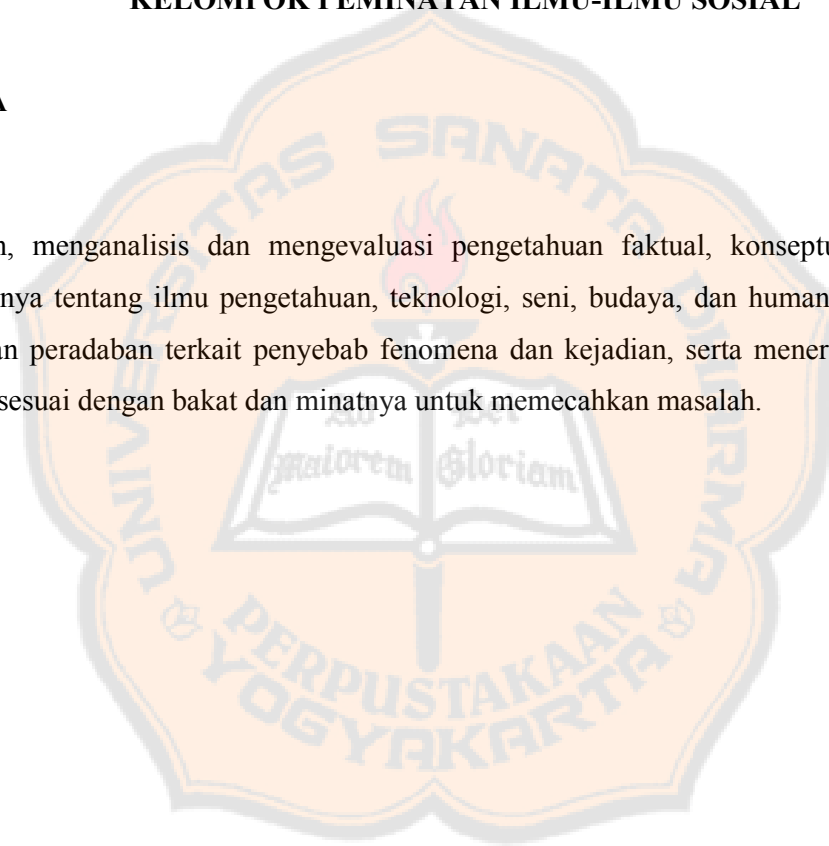
SILABUS
MATA PELAJARAN SEJARAH
KELOMPOK PEMINATAN ILMU-ILMU SOSIAL

Satuan Pendidikan : SMA

Kelas : XII

Kompetensi Inti :

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.



Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>3.6 Mengevaluasi secara kritis hubungan kausalitas kebijakan politik dan pemberontakan antara tahun 1948-1965.</p>	<p>Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963</p>	<p>Menanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menanya dan berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi dan pendalaman pemahaman tentang kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963. <p>Mengeksplorasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan informasi dan data lanjutan terkait dengan pertanyaan dan materi tentang Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963, melalui internet, majalah, surat kabar dan sumber lain yang mendukung. 	<p>Tugas:</p> <p>Membuat rekonstruksi dalam bentuk tulisan tentang pengaruh Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963 terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan bangsa Indonesia.</p> <p>Observasi:</p> <p>Mengamati kegiatan peserta didik dalam proses mengumpulkan data, analisis data dan pembuatan laporan .</p> <p>Portofolio:</p> <p>Menilai laporan tertulis hasil rekonstruksi tentang pengaruh Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963 terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan bangsa Indonesia.</p> <p>Tes:</p> <p>Menilai kemampuan peserta didik dalam mengevaluasi materi tentang pengaruh Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963 terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan bangsa Indonesia.</p>	<p>2 x 45 Menit</p>	<p>Sumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> I Wayan Badrika, 2006. <i>Sejarah untuk SMA Kelas XII</i>. Jakarta: Erlangga Kardiyat Wiharyanto, 2011. <i>Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009</i>. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma <p>Alat :</p> <p>LCD,OHP, Kartu Soal, Kartu Nomor, Gambar, Peta dan Papan tulis.</p>

Mengasosiasikan:

- Mengevaluasi informasi dan data-data yang didapat untuk membuat rekonstruksi dan tulisan tentang pengaruh Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963 terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan bangsa Indonesia.

Mengomunikasikan:

- Menyajikan hasil rekonstruksi dalam bentuk tulisan tentang pengaruh Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963.



Yogyakarta, 30 Agustus 2014
Guru Mata Pelajaran

Fx. Budi Kustanto

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMA
Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas / Semester : XII/ Gasal
Materi Pokok : Perjuangan Mempertahankan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sub Materi Pokok : Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963
Waktu : 2 x 45 Menit
Kompetensi Keahlian : Ilmu Pengetahuan Sosial

A. Kompetensi Inti:

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

B. Kompetensi Dasar

- 3.6 Mengevaluasi secara kritis hubungan kausalitas kebijakan politik dan pemberontakan antara tahun 1948-1965.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 3.6.1 Mensyukuri atas segala karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa tentang perkembangan teknologi di Indonesia
- 3.6.2 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, kerjasama, santun, dan proaktif dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran sejarah.

3.6.3 Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik militer antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1963.

3.6.4 Mengidentifikasi pengaruh kebijakan Presiden Soekarno mengangyng Malaysia terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya bangsa Indonesia.

3.6.5 Menganalisis penyelesaian konfrontasi militer Indonesia dengan Malaysia.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Menunjukkan sikap syukur dan menjalankan ajaran agama
2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, kerjasama, santun, dan proaktif dalam kerja kelompok
3. Melalui bacaan teks, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya konflik militer antara Indonesia dengan Malaysia.
4. Melalui bacaan teks, gambar, peta, dan diskusi siswa dapat menjelaskan penyelesaian konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia.
5. Melalui pembelajaran mengenai kebijakan Presiden Soekarno mengangyng Malaysia, peserta didik dapat mengemukakan nilai-nilai yang diperoleh dari pembelajaran ini.

E. Materi Ajar:

1. Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963

F. Metode/Model/Strategi Pembelajaran:

- Metode: diskusi, presentasi dan tugas
- Model : *Studen Team Achievment Division (STAD)*
- Strategi Pembelajaran: *Saintifik*

G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi Waktu
<p>1. Kegiatan Pendahuluan</p>	<p>a. Guru mengucapkan salam pembuka. b. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. c. Guru menanyakan kabar peserta didik. d. Guru menanyakan materi pelajaran sejarah yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya e. Guru memberikan wacana secara umum tentang Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963. f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. g. Guru memberikan pre-test kepada peserta didik. h. Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok</p>	<p>15'</p>
<p>2. Kegiatan Inti</p>	<p>A. Mengamati ❖ Guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca teks dan menganalisa: ➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Presiden Soekarno berkonfrontasi dengan Malaysia. ➤ Dampak konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia.</p> <p>B. Menanya Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat dari hasil diskusi kelompok.</p> <p>C. Menalar Dari hasil diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik militer antara Indonesia dengan Malaysia.</p>	<p>60'</p>

	<p>D. Mengkaitkan</p> <p>Siswa dapat mengemukakan nilai-nilai yang diperoleh dari diskusi kelompok tentang Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963</p> <p>E. Mengkomunikasikan</p> <p>Antar kelompok diskusi dapat mengkomunikasikan hasil diskusi untuk dapat menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama.</p>	
<p>3. Penutup</p>	<p>a. Guru dan siswa melakukan refleksi dan menyimpulkan manfaat serta nilai-nilai yang diperoleh setelah mempelajari materi yang telah didiskusikan.</p> <p>b. Konfirmasi mengenai materi pembelajaran tentang Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963.</p> <p>c. Guru memberikan tugas lanjutan berupa PR kepada siswa.</p> <p>d. Guru memberitahukan rencana pembelajaran yang akan datang.</p> <p>e. Guru mengucapkan salam kepada siswa</p>	<p>15'</p>

H. Media dan Sumber Belajar

1. Media: LCD, OHP, Kartu Soal, Kartu Nomor Soal, Peta dan Gambar.
2. Sumber Belajar:
 - I Wayan Badrika, 2006. *Sejarah untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Erlangga
 - Kardiyat Wiharyanto, 2011. *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

I. Penilaian Hasil Belajar

1. Teknik: Tes dan Non tes
2. Bentuk:
 - a. Tes : Essay, dan pilihan ganda (terlampir)
 - b. Non Tes : Portofolio, observasi, proyek dan portofolio (terlampir)

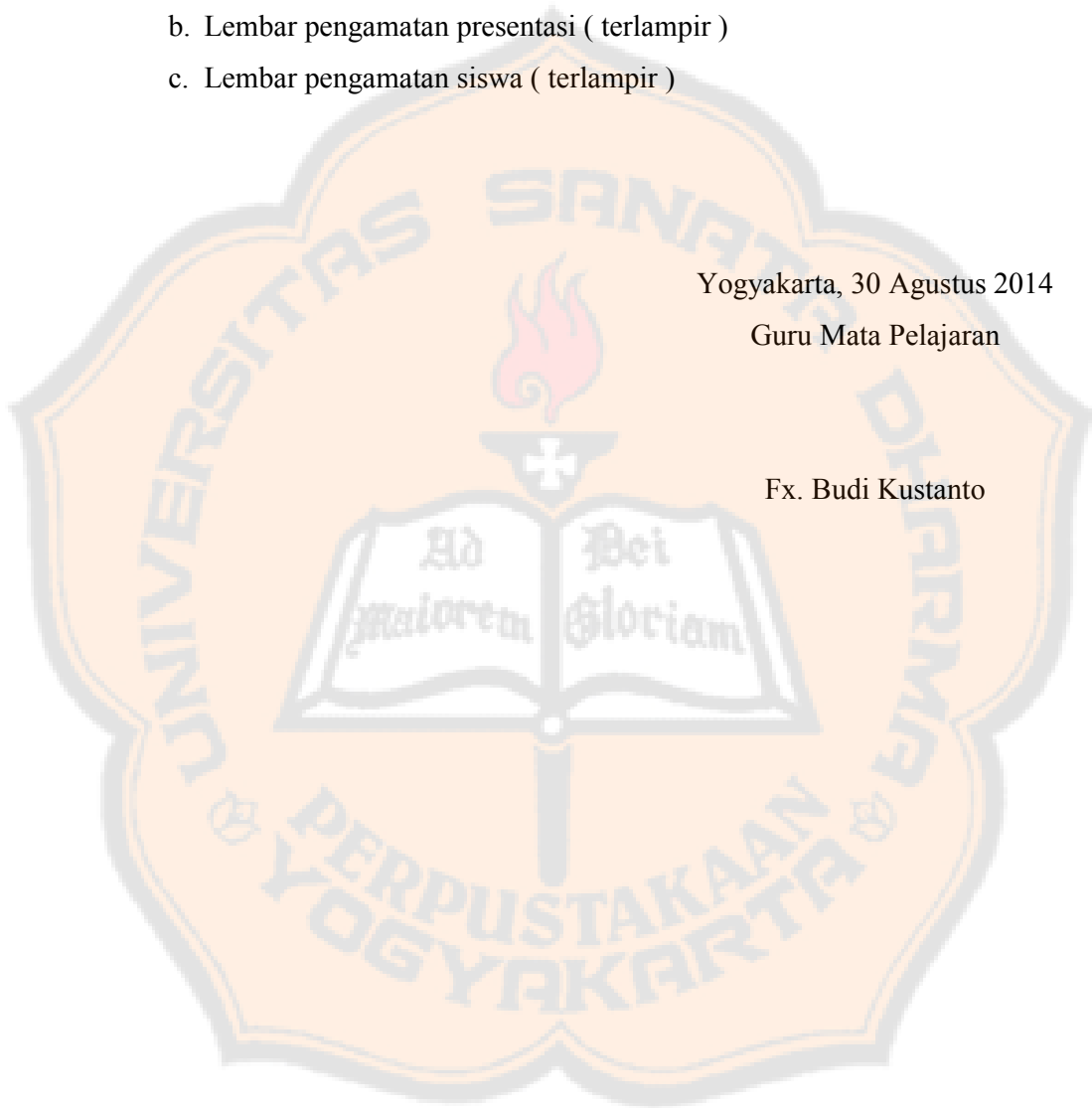
c. Instrumen Penilaian

1. Tes tertulis : pilihan ganda dan essay (terlampir)
2. Non tes :
 - a. Lembar pengamatan kerja kelompok (terlampir)
 - b. Lembar pengamatan presentasi (terlampir)
 - c. Lembar pengamatan siswa (terlampir)

Yogyakarta, 30 Agustus 2014

Guru Mata Pelajaran

Fx. Budi Kustanto



Contoh soal-soal Tes

A. Soal pilihan Ganda

1. Hubungan Indonesia dengan Malaysia dari dulu memang tidaklah harmonis dan selalu mengalami fluktuasi politik. Berbagai macam persoalan yang mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Berikut ini yang bukan termasuk persoalan yang dihadapi oleh Indonesia dengan Malaysia adalah ...
 - a. Pemerintah Indonesia mencurigai keterlibatan Malaysia dalam pemberontakan PRRI dan Permesta yang terjadi di Indonesia tahun 1958
 - b. Presiden Soekarno sangat kecewa terhadap perdana menteri Malaysia yang mengambil langkah abstain dalam pemungutan suara tentang nasib Irian Jaya
 - c. Adanya perbedaan pendapat antara Indonesia dengan Malaysia mengenai masalah keamanan regional
 - d. Hubungan kerjasama dalam perdagangan Internasional antara Indonesia dengan Malaysia hingga saat ini masih harmonis
 - e. Sering terjadi perebutan wilayah antara Indonesia dengan Malaysia yang menjadi negara tetangga.

2. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia negara Jepang memiliki inisiatif untuk mengadakan perundingan untuk menyatukan kedua negara ini. Perundingan yang dilakukan di Tokyo ini ditindaklanjuti dengan pertemuan di Manila. Wakil dari Indonesia yang menghadiri pertemuan di Manila adalah ...

a. Tun Abdul Razak	d. Ir. Soekarno
b. Immanuel Pelaez	e. Subandrio
c. Soeharto	

3. Konverensi Tingkat Tinggi yang dihadiri ketiga negara Indonesia, Filipina, dan Malaysia ini menghasilkan solusi bagi pemecahan Malaysia, diantaranya adalah kecuali ...
 - a. Kalimantan Utara akan menjadi daerah milik Malaysia

- b. Federasi Malaysia tidak akan dibentuk sebelum hak penentuan nasib sendiri dari rakyat Kalimantan Utara dilaksanakan
 - c. Sekertaris Jenderal PBB yang menyelenggarakan referendum
 - d. Penduduk Sabah atau Serawak yang berada di luar Kalimantan Utara harus diberi hak suara untuk menyalurkan aspirasinya
 - e. PBB akan mengirimkan tim pekerjanya untuk melangsungkan referendum
4. Perwakilan dari Malaysia yang ikut menghadiri perundingan untuk menyatukan hubungan persahabatan antara kedua negara yaitu Indonesia dengan Malaysia di Manila adalah ...
 - a. Immanuel Pelaez
 - b. Ir. Soekarno
 - c. Tengku Abdul Rahman
 - d. Tun Abdul Razak
 - e. Subandrio
5. Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1963 mencanangkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat), salah satu isi dari Dwikora adalah ...
 - a. Mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia
 - b. Memperhebat ketahanan revolusi Indonesia dan membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunai
 - c. Membantu Malaysia dalam bidang politik dan ekonomi
 - d. Mempertahankan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia
 - e. Memperketat keamanan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia
6. Untuk memperkuat kedudukan tentara Indonesia di Kalimantan Timur negara Indonesia juga membentuk satu Batalyon Raider Dayak yang di pimpin oleh ...
 - a. Tengku Abdul Rahman
 - b. Otto Abdulrahman
 - c. Mohamad Zafir
 - d. Mayjend Hario Kecik
 - e. Teuku Hasan

7. Konflik antara Indonesia dengan Malaysia mengalami perkembangan yang berpengaruh terhadap perdamaian bagi kedua negara. Adapun faktor yang mempengaruhi penyelesaian konfrontasi antara kedua negara adalah ...
 - a. Masing-masing negara memiliki kelemahan yang dimana dari kelemahan tersebut berpengaruh terhadap ketergantungan antar negara
 - b. Malaysia memiliki banyak Sumber Daya Manusia yang berkualitas dimana Indonesiaa membutuhkan SDM dari Malaysia
 - c. Masing-masing negara tidak mau saling bekerjasama baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik
 - d. Indonesia kaya akan Sumber Daya Alamnya dan negara Malaysia perlu banyak mengimpor SDA dari Indonesia
 - e. Daerah-daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia ingin dikuasai oleh Malaysia
8. Tokoh dari Malaysia yang berperan penting dalam penyelesaian konfrontasi dengan Indonesia antara lain kecuali ...

a. Tan Sri Muhamad Ghazali	d. Tun Abdul Razak
b. Mayjend Hario Kecik	e. Muhamad Sulong
c. Shafei	
9. Konverensi Bangkok antara delegasi Indonesia dengan Malaysia menghasikan kesepakatan. Berikut ini yang bukan merupakan hasil dari konverensi Bangkok adalah ...
 - a. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik
 - b. Rakyat Sabah diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia
 - c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan
 - d. Hubungan perdamaian antara Indonesia dengan Malaysia tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan
 - e. Indonesia dengan Malaysia memiliki kesepakatan perdamaian

10. Sejak dicanangkan Dwikora, Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) mulai aktif melakukan operasi udara di wilayah Sumatera, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Semenanjung Malaya. Pelaksanaan operasi udara oleh AURI ini bertujuan untuk ...
- Mengajak Malaysia untuk menjalin perdamaian dengan Indonesia
 - Melakukan pengintaian dan pemotretan udara di Malaysia Barat dan Timur serta laut Jawa
 - Mengawasi daerah-daerah milik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia
 - Menjaga keamanan untuk wilayah Indonesia dari serangan Malaysia
 - Melakukan negosiasi antara Indonesia dengan Malaysia yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi kedua negara

B. Soal Essay

- Sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik militer antara Indonesia dengan Malaysia?
- Jelaskan pengaruh kebijakan Presiden Soekarno bagi kehidupan rakyat Indonesia dalam bidang politik?
- Bagaimana penyelesaian konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia?
- Jelaskan nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari pembelajaran konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia?

Kunci Jawaban

- | | |
|------|-------|
| 1. D | 6. D |
| 2. E | 7. A |
| 3. A | 8. B |
| 4. D | 9. D |
| 5. B | 10. B |

1. Faktor politik: pemerintah Indonesia menolak hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh PBB yang tidak netral dan pelecehan terhadap lambang negara Indonesia yang di rusak oleh Tengku Abdul Rahman.
2. Rakyat Indonesia mendukung konfrontasi terhadap Malaysia yang terkenal dengan istilah ganyang Malaysia.
3. Konfrontasi militer antara Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan cara damai.
4. Nilai-nilai yang diperoleh dari pembelajaran tersebut adalah:
 - Nasionalisme
 - Pantang menyerah
 - Kerja keras

Lembar pengamatan Non tes

a. Lembar Observasi sikap

LEMBAR PENGAMATAN SIKAP

Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas/Program : XII/IPS
 Kompetensi : KD 3.6.1 dan 3.6.2

No	Nama Siswa	Observasi sikap						Jumlah skor	Nilai
		Sikap relegius		Ketrampilan sosial					
		Syukur	Taat menjalankan agama	santun	Tanggung jawab	Kerja sama	Proaktif		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Keterangan pengisian skor

(4) Sangat tinggi (3) Tinggi (2) Cukup tinggi (1) Kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\sum \text{skor perolehan}}{\text{Skor maksimal (20)}} \times 100$$

Keterangan Nilai :

A = 80-100 : baik sekali

B = 70-79 : baik

C = 60-69 : cukup

D = 60 : kurang

b. Penilaian Presentasi

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas/Program : XII/IPS

Kompetensi : KD 3.6.

Penilaian presentasi hasil diskusi kelompok

Aspek	1	2	3	4
Pengorganisa sian	Peserta tidak bisa memahami presentasi karena informasi tidak disampaikan secara runtut	Perserta mengalami kesulitan memahami presentasi karena penyampaian ide kelompok melompat	Informasi disampaikan dngan urutan logis yang dapat diikuti oleh peserta	Informasi disampaikan dengan urutan logis dan menarik sehingga sangat mudah dipahami oleh peserta
Pengetahuan	Siswa tidak memahami informasi dan tidak dapat menjawab pertanyaan tentang hal yang dipresentasikan	Siswa tidak menguasai informasi dan hanya mampu menjawab pertanyaan sederhana	Siswa menjawab dengan mudah pertanyaan tetapi tidak mampu mengulas	Siswa menunjukkan pengetahuan mendalam dan mampu menjawab pertanyaan dengan

			lebih jauh	ulasan dan penjelasan lebih lanjut
Tampilan	Siswa belum menggunakan prinsip Audio visual yang mendukung presentasi	Siswa menggunakan prinsip Audio visual tidak pada setiap slide presentasinya	Siswa menggunakan prinsip Audio visual pada setiap presentasinya	Siswa menampilkan presentasi yang didukung prinsip Audio visual sehingga sangat jelas
Mekanisme	Siswa menampilkan lebih dari tiga kesalahan ejaan dan kesalahan tatabahasa	Presentasi memuat tiga kesalahan ejaan dan kesalahan tatabahasa	Presentasi memuat dua kesalahan ejaan dan kesalahan tatabahasa	Presentasi tidak memuat kesalahan ejaan dan kesalahan tatabahasa
Kontak mata	Siswa hanya membaca laporan dan tidak ada kontak mata dengan peserta	Siswa kadang menggunakan kontak mata, tetapi masih lebih banyak membaca slide presentasi	Siswa mempertahankan kontak mata, namun masih sebatas menghafal isi slide presentasi	Siswa mempertahankan kontak mata dengan peserta dan mengembangkan isi slide presentasi dengan bahasa yang baik

Keterangan skor :

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :

4 = sangat tinggi

3 = Tinggi

2 = Cukup tinggi

1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\sum \text{skor perolehan}}{\text{Skor maksimal (20)}} \times 100$$

Keterangan Nilai :

A = 80-100 : baik sekali

B = 70-79 : baik

C = 60-69 : cukup

D = 60 : kurang

c. Penilaian Laporan penelitian

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas/Program : XII/IPS

Materi pokok : Kebijakan Presiden Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963

Kompetensi : 3.6.3, 3.6.4 dan 3.6.5

Penilaian Tugas kelompok laporan penelitian

Aspek	Kriteria skor			
	4	3	2	1
Persiapan	Jika memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, daftar pertanyaan dengan lengkap	Jika memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, daftar pertanyaan kurang lengkap (lebih 50% kurang dari 100%)	Jika memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, daftar pertanyaan tidak lengkap. (kurang dari 100%)	Jika tidak memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, daftar pertanyaan

				sangat tidak lengkap (kurang dari 50%)
Pengumpulan data (Heuristik)	Jika daftar sumber sejarah yang dicari semuarah di peroleh dan daftar pertanyaan semua terjawab	Jika daftar sumber sejarah sebagian besar diperoleh dan daftar pertanyaan sebagian besar terjawab	Jika daftar sumber sejarah hanya sebagian kecil yang diperoleh dan daftar pertanyaan sebagian besar terjawab	Jika daftar sumber sejarah hanya sebagian kecil yang diperoleh dan daftar pertanyaan hanya sebagian kecil terjawab
Pengujian data (kritik)	Jika data yang diperoleh semua diuji secara intern dan ekstern	Jika data yang diperoleh sebagian besar diuji secara intern dan kstern	Jika data yang diperoleh hanya sebagian kecil yang diuji secara intern dan ekstern	Jika data yang diperoleh langsung dipakai tanpa diuji
Penafsiran data (interpretasi)	Jika penafsiran dilakukan terhadap semua data baik yang tersurat dan tersirat	Jika penafsiran dilakukan terhdap sebagian besar data baik yang tersurat dan tersirat	Jika penafsiran dilakukan terhadap sebagian kecil data yang tersurat dan tersirat	Jika penafsiran dilakukan terhadap sebagian kecil data yang

				tersurat dan tidak dilakukan terhadap data yang tersirat
Penulisan laporan	Jika sistematika penulisan benar, memuat simpulan, dan bahasa komunikatif.	Jika sistematika penulisan benar, memuat simpulan, namun bahasa kurang komunikatif	Jika penulisan sistematis, tapi bahasa kurang komunikatif, dan tidak memuat simpulan	Jika penulisan kurang sistematis, bahasa kurang komunikatif, tidak memuat simpulan

Keterangan skor :

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :

- 4 = sangat tinggi
- 3 = Tinggi
- 2 = Cukup tinggi
- 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\sum \text{skor perolehan}}{\text{Skor maksimal (20)}} \times 100$$

Keterangan Nilai :

- A = 80-100 : baik sekali
- B = 70-79 : baik
- C = 60-69 : cukup
- D = 60 : kuran

Lampiran materi pembelajaran

Kebijakan Presiden Soekarno Terhadap Pembentukan Federasi Malaysia

Tahun 1963

A. Reaksi pemerintah Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia.

Presiden Soekarno menentang keras rencana pembentukan Federasi Malaysia yang meliputi Sabah dan Serawak. Penentangan ini telah melahirkan anti pati warga Malaya di Kuala Lumpur dengan menggelar aksi unjuk rasa di kantor perwakilan diplomatik Indonesia. Para demonstran menginjak-injak foto Presiden Soekarno dan lambang negara Indonesia yang berupa Garuda Pancasila. Peristiwa tersebut sangat melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Rakyat Malaya harus menanggung semua penghinaan yang ditujukan kepada Indonesia. Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan ganyang Malaysia.

B. Konfrontasi Indonesia Terhadap Malaysia

Presiden Soekarno sebagai seorang nasionalis sejati berhasil mengobarkan semangat rakyat Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Ribuan sukarelawan mendaftarkan diri untuk ikut berperang melawan proyek kolonialisme baru Inggris yang mendirikan federasi Malaysia. Konfrontasi militer diawali dengan konfrontasi politik yang berupa pemutusan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur. Untuk mengoptimalkan sumber ekonomi untuk keperluan perang maka blokade ekonomi terhadap Malaysia juga diberlakukan. Perusahaan milik Inggris juga diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia mengirimkan angkatan perangnya ke daerah perbatasan dengan Malaysia. Kontak senjata pecah dengan hebat di perbatasan Kalimantan Utara. Tentara Indonesia dan para sukarelawan berhasil memasuki Kalimantan Utara.

C. Penyelesaian konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia

Amerika Serikat merasakan kekhawatiran konflik militer antara Indonesia dengan Malaysia yang semakin menghebat. Untuk mencegah meluasnya pertempuran di Asia Tenggara, Amerika berupaya memediasi

perundingan damai. Pihak-pihak yang bertikai sepakat menggelar perundingan di Tokyo. Perundingan Tokyo menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara Indonesia dengan Malaysia. Namun gencatan senjata ini tidak berumur panjang karena masing-masing pihak saling membenarkan tindakannya. Konflik militer yang semakin berlarut-larut ternyata segelintit elit militer Indonesia khususnya TNI-AD berupaya untuk meredakan konflik bersenjata. Ternyata pihak Malaysia juga ada pihak yang berpikiran positif untuk mengakhiri perang. Kontak hubungan tidak resmi dan bersifat rahasia kemudian terjalin antara Suharto dengan Muhamad Ghazali. Terjadinya perubahan politik di Indonesia ternyata membawa pengaruh bagi terciptanya normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian para perwakilan kedua belah pihak mengadakan perundingan di Bangkok dan menghasilkan kesepakatan damai. Melalui proses yang panjang maka konflik antara Indonesia dengan Malaysia diakhiri dengan penandatanganan damai di Jakarta.

